

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kota Bontang terletak di Propinsi Kalimantan Timur berada pada 117°23' sampai 117°38' Bujur Timur dan 0°01' sampai 0°12' Lintang Utara dengan luas 158,2276 Km<sup>2</sup>. Kota Bontang terdiri dari 70% wilayah perairan laut dan 30% wilayah darat. Wilayah Kota Bontang terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Barat. Batas wilayah Kota Bontang di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur (BPS, 2021). Banyak industri besar berada di Kota Bontang diantaranya PT. Badak NGL memproduksi gas alam cair berada di Kecamatan Bontang Selatan, PT. Indominco yang bergerak di bidang pertambangan batubara berada di Kecamatan Bontang Barat dan PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT) yang memproduksi pupuk urea dan NPK berada di Kecamatan Bontang Utara. Beberapa perusahaan berada di Kawasan Industri milik PT. Kaltim Industrial Estate (PT.KIE) yang merupakan anak perusahaan PKT, sedangkan PKT merupakan salah satu dari anak perusahaan Pupuk Indonesia Hoding Company (PIHC) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga wajib melaksanakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pada pasal 3 huruf c). Program TJSL BUMN bertujuan untuk membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri untuk masyarakat sekitar perusahaan. PKT sebagai anak perusahaan PIHC diharapkan membawa manfaat pada *shareholder* dan *stakeholder*, terutama kepada masyarakat sekitar perusahaan yang terkena

dampak dari kegiatan perusahaan dengan melaksanakan TJSL atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) di wilayah terdampak dari kegiatan bisnisnya. Wilayah terdampak sesuai dengan dokumen lingkungan PKT di sisi darat adalah Kelurahan Guntung dan Kelurahan Lhoktuan, sedangkan di wilayah pesisir adalah Tanjung Limau Kelurahan Bontang Baru yang berdekatan dengan alur layar kapal PKT. PKT melaksanakan program CSR di wilayah terdampak ring 1 dan di wilayah ring 2.

PKT telah melaksanakan TJSL sejak pabrik mulai dibangun misalnya membangun akses jalan dari Guntung ke Pabrik PKT, dari Lhoktuan ke Pabrik PKT dan dari PC-6 ke pabrik PKT semula untuk akses jalan karyawan masuk bekerja namun selanjutnya juga digunakan untuk masyarakat sekitarnya dalam melaksanakan kegiatan setiap harinya. Selain itu PKT juga memberikan bantuan pendidikan, ketrampilan bagi warga sekitar dan bantuan sosial lainnya seperti sunatan masal, pengobatan dan penanaman pohon penghijauan serta melaksanakan program kemitraan untuk pengusaha kecil dan bina lingkungan / wilayah (Meizar,et.al,2020).

Pembinaan wilayah selain dilakukan oleh Departemen PKBL yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melaksanakan program pembinaan lingkungan dan kemitraan, dilakukan juga oleh Departemen Humas, Departemen Lingkungan Hidup dan Departemen Umum yang dikoordinir oleh Komite CSR yang ditunjuk oleh Perusahaan yang tugasnya mengumpulkan dan mengkoordinir semua kegiatan CSR PKT serta membuat laporan ke Top Managemen PKT (internal perusahaan) dan ke Pemkot Bontang (ekternal perusahaan), namun tidak mengintegrasikan seluruh program CSR PKT menjadi satu yang terfokus. Inilah yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan CSR di PKT, sehingga program sebagian besar masih bentuk *charity*, program CSR dari Departemen satu dengan yang lainnya berjalan sendiri-sendiri, tidak saling terintegrasi, malah tumpang tindih dan terlihat seolah saling bersaing program diantara Departemen yang menjalankan CSR, sehingga masyarakat sekitar perusahaan tidak

mengenal PKT, sebagai perusahaan yang memberikan program CSR, malahan yang dikenal adalah masing-masing nama personil dari Departemen yang memberikan program CSR tersebut. Ini merupakan masalah besar bagi PKT dimana perusahaan sudah mengeluarkan dana CSR untuk masyarakat sekitar perusahaan, namun nama perusahaan PKT tidak dikenal oleh masyarakat sekitarnya (Syarif, 2011). Pelaksanaan program CSR di PKT masih ditempelkan di beberapa unit kerja belum ada unit kerja khusus yang mengelola CSR. Menurut Kartini (2013) praktek CSR yang baik dikelola oleh unit kerja khusus yang menangani CSR (*bold in*) bukan dititipkan ke unit kerja yang lain (*bold out*) (Kartini, 2013). Implikasinya perusahaan dalam melaksanakan program CSR tidak didahului dengan kajian *social mapping* sehingga program tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat binaan, dalam menyusun rencana tidak melibatkan masyarakat binaan sehingga tidak ada partisipasi masyarakat binaan dalam proses *comdev*-nya. Bila ditinjau dari teori Arstein (1969) tentang *Eight rungs on a Ladder of Citizen Participation* (delapan tingkatan anak tangga peran masyarakat dalam perencanaan) masih menduduki tingkatan pertama dan kedua (paling rendah) yaitu masuk level non partisipasi yang terdiri dari 2 anak tangga terbawah pada tingkat ke-1 *manipulation* (manipulasi) dan tingkat ke-2 *therapy* (Terapi). Pada level ini pemegang kekuasaan (perusahaan) tidak mengingini komunitas terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Sebagai akibatnya adalah program CSR tidak berdampak positif pada masyarakat dan perusahaan serta masyarakat sekitar tergantung pada perusahaan (*dependent community*).

Permasalahan lainnya menyangkut kondisi masyarakat sekitar perusahaan namun permasalahan masyarakat sekitar yang sesungguhnya belum tertangkap oleh perusahaan, bahwa sesungguhnya ada permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir Tanjung Limau Kelurahan Bontang Baru yang paling dekat dengan perusahaan dan masyarakat RT-07 Kelurahan Guntung yang lokasinya berhimpit dengan batas Pabrik-5 PKT. Dari hasil

wawancara peneliti dengan Pak Maeng tokoh nelayan Tanjung Limau, menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh nelayan tangkap Tanjung Limau Bontang adalah hidupnya tergantung cuaca di laut dan terjerat hutang pada tengkulak. Bila gelombang laut tinggi, mereka tidak bisa melaut menangkap ikan, untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka berhutang pada tengkulak/punggawa. Bila cuaca laut sudah baik/ gelombang laut normal, maka mereka melaut kembali menangkap ikan. Ikan hasil tangkapan harus disetor kepada tengkulak pemberi hutang dengan harga yang ditentukan oleh tengkulak, demikian seterusnya hingga mereka tidak bisa lepas dari jeratan hutang pada tengkulak. Permasalahan yang lainnya dari sisi lingkungan, menurut Hadi (2019b) pada saat menangkap ikan, nelayan masih menggunakan bom ikan dan bahan kimia potash yang merupakan racun bagi ikan dan biota laut lainnya akibatnya ikan besar, ikan kecil termasuk bibit ikan terikut mati bahkan karang disekitarnya juga terikut mati (Hadi, 2019b). Selain itu menurut Pak Mukhtar Ketua Koperasi Nelayan Bontang Ekonomi dan Pariwisata Maritim saat wawancara dengan peneliti menyampaikan bahwa para nelayan saat menangkap ikan di laut masih menggunakan peralatan penangkap ikan yang merusak karang. Karang merupakan tempat pemijahan ikan, sehingga bila karang rusak maka punahlah ikan besar beserta anakannya. Dari hasil observasi, nelayan makin hari makin jauh untuk menangkap ikan yang lebih besar yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dari ikan rucah (rucah adalah ikan kecil yang digunakan sebagai pakan ikan dengan harga murah Rp 2000,-/kg). Sementara itu kapal yang mereka (nelayan) punyai kebanyakan berkapasitas kecil sekitar 1-3 Gross Ton (GT) yang hanya bisa digunakan melaut di bawah 12 mil dari pantai dengan ombak kecil sampai sedang (di bawah 1 meter), sehingga mereka hanya mendapatkan ikan kecil saja, tidak bisa menangkap ikan yang lebih besar yang berada di tengah laut yang berjarak lebih dari 12 mil dari pantai dan berombak besar (diatas 1 meter). Sebaliknya nelayan hanya bisa menangkap ikan di sekitar pesisir pantai

dan ikan yang didapat ikan kecil (rucah), bila dijual di pasar tradisional harganya sangat murah. Bila rucah tersebut tidak habis dijual di pasar, maka dibuang ke laut yang berakibat mencemari lingkungan laut sekitar Tanjung Limau, bahkan bila ada LSM yang mengetahuinya dijadikan bahan isu lingkungan ke PKT bahwa limbah cair PKT telah mencemari lingkungan dan mereka meminta ganti rugi ke PKT.

Untuk permasalahan warga yang paling dekat dengan pabrik di area darat, dari hasil wawancara peneliti dengan Pak Yunus Ketua RT-07 Kelurahan Guntung mengatakan: permasalahan yang dihadapi oleh warga / masyarakat RT-07 Kelurahan Guntung yang lokasinya berhimpitan dengan Pabrik-5 PKT adalah pada tahun 2010 mendapatkan penghargaan “*Black Award*” berupa bendera hitam dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang pada saat adanya lomba kebersihan di Kota Bontang yang diikuti oleh seluruh RT di Kota Bontang untuk menyambut hari Ulang Tahun Kota Bontang pada bulan Oktober. Hal ini disebabkan karena lingkungan RT-07 Kelurahan Guntung kumuh dan kotor serta warganya banyak menderita penyakit kulit (scabies). Di lingkungan RT-07 banyak tumpukan sampah menggunung dan bau kurang sedap yang berasal dari tumpukan sampah tercium saat berada di lingkungan RT-07. Dengan perolehan penghargaan *black award* tersebut warga RT-07 merasa malu, maka Ketua RT-07 bersama warga mencanangkan program menyapu halaman rumah dan mengelola sampah organik hasil menyapu halaman menjadi kompos secara konvensional dengan didampingi oleh Kasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, staff dan Kasi kesejahteraan Kelurahan Guntung untuk mengajari warga memilah sampah dan menjadikannya kompos dengan cara ditumpuk saja di lubang galian tanah, sehingga memerlukan waktu sekitar 50 hari untuk menjadi kompos, sedangkan sampah non organik dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Sejalan dengan program perusahaan yang mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sejak tahun 1995 guna mendorong terwujudnya ketaatan lingkungan (*environmental compliance*) dan keunggulan lingkungan (*environmental excellent*). Dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup, PKT melakukan transformasi kelembagaan dalam hal ini penyempurnaan organisasi yang mampu mengakomodir aspek *beyond compliance* Proper yaitu yang salah satunya adalah *comdev*. Merujuk pada aspek *Comdev* pada *beyond compliance* Proper bahwasanya penting untuk membentuk bagian CSR yang fokus menangani pelaksanaan CSR, perlu transformasi kelembagaan dalam hal ini perubahan struktur organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab transformasi kelembagaan di PKT adalah saat mengikuti Proper *beyond compliance*, namun hal ini bukan penyebab satu-satunya, penyebab yang lainnya adalah adanya regulasi Pemerintah khususnya dari Kementerian BUMN dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL), karena PKT merupakan anak perusahaan dari Pupuk Indonesia (PI) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya PKT meningkatkan kewenangan struktur organisasi CSR yang semula dikepalai oleh Kepala Bagian di bawah Departemen PKBL sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 25/DIR/IV.16 tanggal 11 April 2016 halaman 14 dari 15 mengenai Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Nomor 8/DIR/I.16 tentang Struktur Organisasi (SO). Selanjutnya sekitar setahun kemudian dirasa kewenangannya kurang mencukupi bila CSR dikelola setingkat kepala bagian (grade IIIA) saja karena dana yang dikelola cukup besar, maka dilakukan penyempurnaan SO yang mana kewenangan bagian CSR ditingkatkan menjadi Departemen CSR yang dikepalai oleh seorang Manager (grade IIA) sesuai dengan SK Direksi Nomor 21/DIR/VI.17 tanggal 16 Juni 2017 hal 2 dari 19 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Nomor 5/DIR/II.17 tentang Perubahan

SO PT. Pupuk Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Terlihat peran top management sangat proaktif. Melalui SK direksi tersebut justru saat ini sebaliknya Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL) atau sering dirangkai menjadi PKBL, menjadi bagian dari Unit Kerja Departemen CSR. Pada tahun 2017 semua program CSR PKT dipusatkan dan dikelola serta dilaksanakan oleh Departemen CSR mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, *monitoring* dan evaluasinya (Meizar.et.al., 2020).

PKT melaksanakan program CSR dalam bentuk *charity, infrastruktur, capacity building* dan *empowerment* sesuai Permen Lingkungan Hidup (LH) Nomor 3 Tahun 2014. Beberapa program CSR unggulan PKT adalah Toga Enggang Herbal di RT-06 dan Kompos Berbasis Masyarakat di RT-07 Kelurahan Guntung, Budidaya Ikan Kerapu dan Lobster di Tanjung Limau Kelurahan Bontang Baru, Inkubator Bisnis (Inbis) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Permata Bunda di Kelurahan Api-Api dan *Better Living in Malahing* di Kelurahan Tanjung Laut Indah dan masih banyak program CSR lainnya. Program CSR PKT tentang budidaya ikan kerapu dan lobster diperuntukkan bagi masyarakat nelayan Tanjung Limau Kelurahan Bontang Baru yang sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan jaring tangkap, sedangkan program CSR PKT untuk masyarakat RT-07 Kelurahan Guntung sebagai ring 1 dari PKT adalah Kompos berbasis masyarakat (PKT, 2020).

Dampak positif pelaksanaan program CSR dapat disinergikan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs sebagai tindak lanjut dari kesepakatan global *Milennium Development Goals (MDGs)* untuk mensejahterakan masyarakat dunia. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tanggal 25 September 2015 meluncurkan SDGs yang merupakan agenda global melanjutkan upaya dan capaian agenda global MDGs tersebut. Kesepakatan global *SDGs* mempunyai 17 pilar dengan 169 capaian untuk merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan di segala bidang dan telah disepakati oleh 193 negara bahwa tujuan

pembangunan di Negara-negara yang menandatangani kesepakatan adalah mewujudkan kondisi yang: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri dan inovasi serta infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dan kemitraan untuk mencapai tujuan (Firmansyah, 2015).

Menurut Hadi (2019b) tujuh belas (17) pilar SDGs tersebut dirangkum menjadi tiga hal pokok meliputi pembangunan manusia, sosial ekonomi, serta lingkungan, meliputi:

- (1) pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender
- (2) pembangunan ekonomi sosial: ketimpangan, kemiskinan, ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi
- (3) pembangunan lingkungan: menjaga ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Indonesia sebagai salah satu Negara anggota PBB turut serta melaksanakan SDGs yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang “Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” mulai tahun 2016 sampai tahun 2030. Selanjutnya dibuat peta jalan (*road map*) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2017 sampai tahun 2030 yang disesuaikan dengan sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaannya dibuat Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN TPB) yaitu dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Pelaksanaan di tingkat

provinsi dibuat Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB yaitu dokumen rencana kerja lima tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan baik langsung maupun tidak langsung untuk mendukung pencapaian TPB yang disesuaikan dengan sasaran pembangunan daerah. Dalam pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 tahunan bersama bupati/walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya. Sumber dana berasal dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil dari pelaksanaan TPB daerah dilaporkan ke tingkat nasional dan selanjutnya menjadi laporan tahunan Indonesia pada tingkat regional dan global. Dari uraian tersebut berarti dalam pencapaian TPB semua unsur pemerintah dan masyarakat dilibatkan termasuk dunia usaha sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Menurut Hadi (2019b) tanggungjawab mewujudkan pembangunan berkelanjutan bukan hanya merupakan tugas Pemerintah tetapi juga dunia usaha karena tidak mungkin pembangunan diwujudkan hanya oleh pemerintah. Perusahaan sebagai bagian dari dunia usaha bertindak sebagai produsen yang mengambil sumber daya yang ada di alam untuk diolah, dan kemudian hasilnya dipasarkan kepada konsumen. Dalam pengambilan dan proses sumber daya alam ini muncul berbagai dampak, yang biasanya dirasakan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan yang mengelola sumber daya alam (minyak bumi, gas alam, batu bara, hutan dan lain-lain) berada pada kondisi miskin. Padahal, biasanya merekalah yang menerima dampak langsung dampak negatif operasi perusahaan.

Jika perusahaan-perusahaan yang dalam proses produksinya mengolah barang setengah jadi atau barang jadi tidak mengelola lingkungan dengan baik, maka menimbulkan

bahaya dan pencemaran lingkungan. Dampak negatif yang ditimbulkannya adalah polusi udara, pencemaran air akibat limbah industri, sumber daya alam dan lingkungan yang rusak akibat proses industri. Perusahaan yang tidak mengelola lingkungan dengan baik maka pada akhirnya berefek buruk kepada manusia, karena limbah yang dikeluarkannya dapat mencemari udara, tanah dan badan air / sungai di sekitar tempat tinggal manusia, sehingga berdampak buruk pada manusia. Manusia akan menderita kerugian karena menderita sakit ISPA bila udara tercemar, sakit scabies / sakit kulit gatal-gatal bila air tanah atau sumur tercemar bahkan bisa gagal panen, bila air sungai untuk mengairi sawah tercemar. Sumber daya alam abiotik sebagai penopang kehidupan mengandung racun yang tidak bisa lagi dinikmati, sumber daya alam biotik mengalami kepunahan dan bahkan nyawa dari anggota keluarganya bisa juga hilang akibat kecelakaan, jatuh ke lubang galian tambang karena banyaknya lubang galian tambang yang tidak ditutup oleh perusahaan penambang, sebagai contoh:

1. PT. Indorayon dengan nama baru PT. Toba Pulp Lestari (TPL) memproduksi pulp untuk bahan baku kertas. Limbah yang dikeluarkan dari pabrik mencemari udara sehingga masyarakat sekitar menderita penyakit ISPA. Selain itu masyarakat lokal juga dirugikan karena menurunnya hasil panen akibat bulir-bulir padi banyak yang tidak berisi / kosong. Hutan penduduk yang telah ditanami pohon kemenyan lebih dari tiga generasi juga rusak, berdampak negatif pada masyarakat sekitar dengan berkurangnya sumber penghasilan dari getah pohon kemenyan (Morgan, 2017).

2. Sungai Bengawan Solo tercemar

Pencemaran sungai Bengawan Solo telah mencapai titik tertinggi. Selain aroma tidak sedap, air di Sungai Bengawan Solo berwarna hitam pekat sehingga banyak ikan mati ditemukan. Aliran Sungai Bengawan Solo yang berhulu di Pegunungan Sewu Wonogiri Jawa Tengah dan berhilir di Gresik Jawa Timur tidak lagi seindah sebelumnya.

Pencemaran yang parah telah menjadikan sungai tidak lagi dapat memberikan kehidupan warga yang tinggal di sepanjang sungai itu. Misalnya pembuangan limbah di daerah Surakarta seperti dari industri *ciu* (alkohol), pewarna tekstil hingga pengolahan industri lain di sekitar Bengawan Solo diduga menjadi biang keladi terjadinya pencemaran. Dampaknya Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Blora yang memanfaatkan aliran sungai Bengawan Solo sebagai air baku terpaksa menghentikan operasionalnya karena pencemaran, sehingga 12 ribu pelanggan PDAM tidak dapat lagi mendapat pasokan air bersih. Puluhan perahu nelayan hanya bersandar di dermaga sepanjang sungai Bengawan Solo, aktivitas ratusan nelayan mencari ikan yang sebelumnya cukup ramai dari pagi hingga petang terpaksa terhenti setelah sungai itu tercemar (Safuan, 2019). Sampai saat ini masih adanya berita tentang “Air Bengawan Solo di Bojonegoro berubah Hitam. Diduga Tercemar Limbah, Senin 14 Juni 2021. Warga sekitar menduga, perubahan warna pada air Sungai Bengawan Solo itu akibat tercemar limbah dari hulu sungai. Pemandangan ini nampak terlihat di wilayah bagian barat Kabupaten Bojonegoro, mulai dari Kecamatan Margomulyo hingga Kecamatan Kasiman. Di sepanjang Sungai Bengawan Solo itu air mendadak kehitaman (Mahdi.D, 2021).

### 3. lubang galian bekas tambang di Kalimantan Timur (Kaltim)

Sesuai data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, saat ini ada 1.735 lubang bekas tambang dari 1.404 perusahaan yang dibiarkan begitu saja di Provinsi Kalimantan Timur. Semua lubang itu menjadi ancaman ekologi dan kematian anak-anak yang rawan tenggelam di danau-danau yang terbentuk sebagai sisa-sisa kegiatan penambangan. Bertubarannya lubang tambang batubara yang tidak direklamasi menyebabkan sudah 36 jiwa melayang dari tahun 2004 hingga tahun 2019, tewas tenggelam di lubang bekas

tambang tersebut. Menurut Jatam, seluruh lubang tambang seharusnya ditutup sebagai solusi, bukan hanya dimodifikasi sebagai kawasan agrowisata (Yovanda, 2019).

#### 4. pencemaran lautan Indonesia oleh sampah plastik

Komunitas *Divers Clean Action* (DCA) merilis temuan bahwa 63% sampah di lautan Indonesia berupa sampah plastik sekali pakai yang merupakan hasil dari industri. Sampah ini sulit didaur ulang karena proses pembuatannya lama, namun harganya rendah di tingkat pengepul. Sampah plastik dapat mengambang di laut dan terdampar di pantai yang berpotensi mencelakai ekosistem dan biota laut. Sampah plastik yang menutupi terumbu karang selama empat hari dapat mematikan terumbu karang karena minim asupan cahaya matahari. Padahal, ketika terumbu karang itu mati, maka ikan juga akan turut mati (Meiliyanti, 2019).

Berdasarkan berbagai kejadian sebagaimana di atas, maka perusahaan diwajibkan untuk turut berperan serta, yang utama adalah mengendalikan dampak dari kegiatan operasional bisnisnya. Selanjutnya turut berkontribusi menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagai pihak yang terdampak melalui program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakannya (Purnaweni, et al, 2021). Salah satu instrument untuk mengelola lingkungan dan sosial adalah Proper. Proper bertujuan mewujudkan ketaatan lingkungan (*environmental compliance*) dan keunggulan lingkungan (*environmental excellence*) pada perusahaan, sehingga mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen insentif reputasi bagi perusahaan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam *beyond compliance* Proper terdapat aspek lingkungan dan aspek sosial (melalui *community development*). Aspek lingkungan meliputi Sistem Manajemen Lingkungan (SML), *Life Cycle Assesment*, penggunaan sumber daya alam yang efisien, pengelolaan limbah dan

perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang langka ataupun yang hampir punah. Untuk aspek sosial, Pemerintah melibatkan Perusahaan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Perusahaan melalui program CSR untuk kemandirian masyarakat. CSR menjadi instrumen penting sebagai perwujudan pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan yang tinggal di daerah dimana perusahaan tersebut beroperasi. Menurut Krisdyatmiko (2017) bila perusahaan menerima sebagian besar warga masyarakat di sekitar perusahaan menjadi karyawannya, dalam arti membuka peluang kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat setempat untuk menjadi pegawai bisa berbahaya untuk jangka panjang, terutama bagi perusahaan yang berbahan baku sumber daya alam yang tidak terbarukan. Jika suatu saat perusahaan tersebut tutup, maka akan dikemanakan masyarakat tersebut setelah mengalami pemutusan hubungan kerja? Pilihan bagi perusahaan sebagian pekerjanya adalah masyarakat setempat, tetapi yang jauh lebih banyak dilakukan adalah memfasilitasi optimalisasi potensi-potensi lokal sehingga bisa menjadi basis penghidupan berkelanjutan masyarakat lokal setelah tidak adanya perusahaan di lokasi tersebut. Disinilah pentingnya Proper yang merupakan salah satu instrument untuk mengelola aspek lingkungan dan sosial.

Pendapat Krisdyatmiko (2017) perusahaan perlu mencermati Rencana Strategis (Rensta) pembangunan yang telah dirumuskan Pemerintah, sehingga program-program CSR perusahaan dikaitkan dengan Renstra tersebut untuk pengembangan kemampuan masyarakat sehingga masyarakat kemudian sanggup berdaya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat harus dilakukan dalam tiap tahapan program pemberdayaan masyarakat sejak dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Untuk mewujudkannya dibutuhkan organisasi Pemerintah yang mampu menjadi

koordinator aktif dalam suasana yang membuat dunia usaha dan masyarakat nyaman dalam kerjasama tersebut.

Dalam kaitan dengan CSR telah terbit Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) menetapkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, ayat (2) tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 09 Tahun 2015 yang menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan di bawah BUMN harus mengalokasikan dana CSR maksimal 4% dari laba kotor per tahun.

Selain melaksanakan CSR, sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan pada aspek sosial dan lingkungan, perusahaan-perusahaan secara sukarela (bukan keharusan) mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper). Proper diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 1995 tentang Program Kali Bersih (Prokasih) yang merupakan cikal bakal lahirnya Proper. Menurut Krisdyatmiko (2017) salah satu tujuan Proper adalah mendorong dunia usaha agar melakukan kontribusi pada masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi melalui program pengembangan masyarakat. Perusahaan yang mengikuti Proper didorong untuk menerapkan prinsip ekonomi hijau dengan kriteria penilaian Proper sesuai Permen LHK Nomor 1 Tahun 2021 yang bisa digolongkan

menjadi 6 golongan yaitu: (1)Sistem Manajemen Lingkungan (SML), (2)Life Cycle Assesment (LCA), (3) Sumber Daya Alam (SDA), (4)Keanekaragaman Hayati (Kehati), (5)*Community Development (Comdev)* dan (6) Tanggap Kebencanaan. Untuk SDA terdiri dari 5 aspek yaitu: (1)efisiensi energi, (2)konservasi air dan penurunan beban pencemar limbah cair, (3)pengurangan emisi dari sumber tak bergerak (cerobong), (4)pemanfaatan dan pengurangan Limbah B3, (5)pengurangan dan pemanfaatan limbah non B3 melalui 3R (*reduce, reuse dan recycle*).

KLHK setiap tahun memberikan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan pengelolaan lingkungan dan aspek sosial dengan baik serta mengumumkannya di media massa dengan tujuan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah mengelola lingkungannya dengan baik, serta memberikan hukuman kepada perusahaan yang mengelola lingkungan dengan melanggar baku mutu sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pengumuman tersebut mengelompokkan perusahaan-perusahaan yang dinilai ke dalam 5 (lima) peringkat yang diberikan oleh KLHK mulai yang terburuk sampai yang terbaik, yaitu: peringkat hitam (paling buruk), merah, biru, hijau dan emas (paling baik). Peringkat hitam diberikan untuk perusahaan yang melakukan pengelolaan lingkungan paling buruk, sebaliknya peringkat emas diberikan kepada perusahaan yang secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environment excellence*) dalam proses produksi dan atau jasa, melaksanakan bisnis beretika dan melaksanakan tanggungjawab sosial kepada masyarakat di sekitarnya.

## 1. Peringkat dan Mekanisme Penilaian Proper

Menurut Hadi, (2019b) peserta Proper adalah perusahaan-perusahaan yang: (a)berorientasi ekspor; (b)berdampak penting; (c)bersentuhan langsung dengan masyarakat; (d)beresiko menimbulkan pencemaran dan berbahaya.

Berdasarkan mekanisme penilaian Proper oleh KLHK, Penilaian Proper diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) KLHK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper). Ada 5 peringkat yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan peserta Proper, sebagai berikut:

1. peringkat hitam

Perusahaan tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik / belum ada fasilitas pengelolaan limbah yang dihasilkan sesuai dengan dokumen lingkungan sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan (menunjukkan adanya pelanggaran).

2. peringkat merah

Perusahaan telah menyediakan pengelolaan limbah yang dihasilkan namun melebihi baku mutu (tidak memenuhi ketentuan minimal).

3. peringkat biru

Perusahaan telah menyediakan fasilitas pengelolaan limbah dan mentaatinya sesuai dengan peraturan yang berlaku (taat, memenuhi peraturan per undang-undangan).

4. peringkat hijau

Perusahaan yang berperingkat hijau telah mentaati seluruh kewajiban pengelolaan limbah secara utuh 100%. Selain memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, perusahaan juga melaksanakan *beyond compliance* meliputi Sistem Manajemen Lingkungan (SML): efisiensi energi, pengurangan dan pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), *3R (reduce, reuse and recycle) limbah non B3*, konservasi air dan penurunan beban limbah cair, penurunan emisi dan gas rumah kaca (GRK), inovasi dalam proses produksi dengan *cleaner production* (produksi bersih), keanekaragaman hayati (Kehati) juga melaksanakan pengembangan masyarakat (*community development*) yang dibiayai dari alokasi dana CSR.

## 5. peringkat emas

Perusahaan yang berperingkat emas telah mentaati seluruh kewajiban pengelolaan limbah 100% dan melaksanakan *beyond compliance*. Penilaian peringkat Emas, menitik beratkan pada kebijakan dan penerapan *community development (Comdev)*. Hal lainnya yang juga masuk dalam penilaian peringkat emas adalah tidak adanya kecelakaan kerja, kebakaran serta tidak adanya isu sosial dalam tahun berjalan saat penilaian Proper tersebut.

Dari hasil evaluasi KLHK terhadap 2038 perusahaan, ditetapkan peringkat kinerja perusahaan pada Proper periode 2019-2020 disajikan pada Tabel 1. Jumlah perusahaan yang dikenakan penegakan hukum ada 1 perusahaan dan 16 perusahaan lainnya saat itu tidak beroperasi (KLHK, 2020)

Tabel 1 Peringkat Proper Perusahaan Tahun 2019-2020

No	Peringkat Proper	Jumlah
1	Hitam	2
2	Merah	233
3	Biru	1629
4	Hijau	125
5	Emas	32

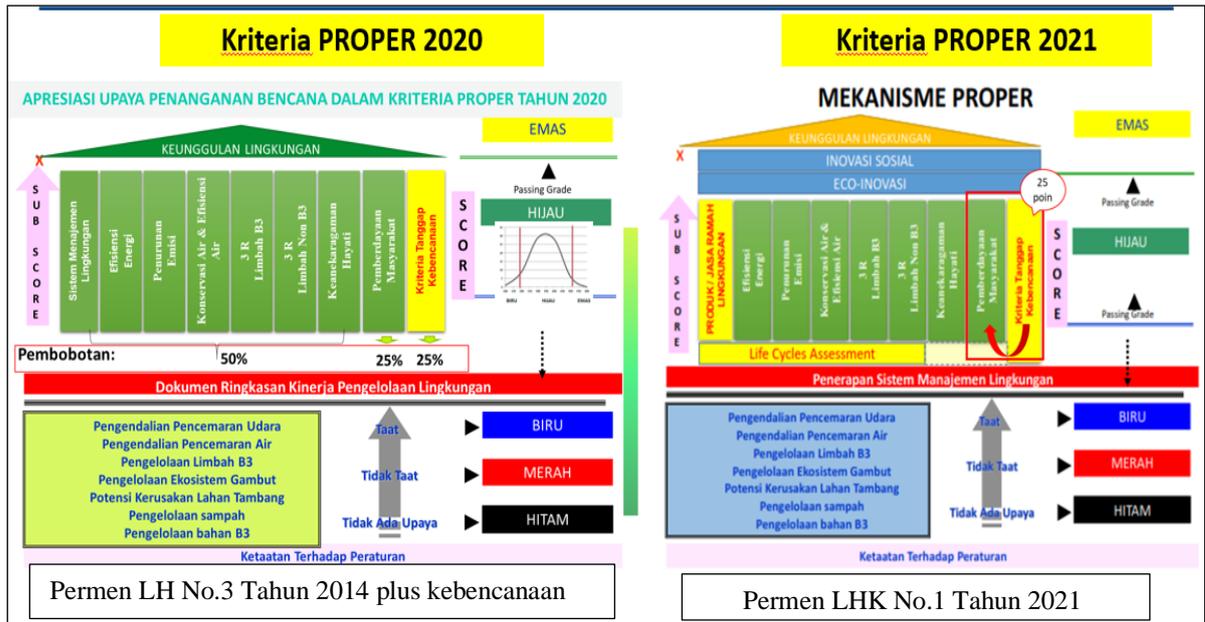
Sumber: KLHK (2020)

Sesuai dengan Permen LH Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper), mekanisme dan kriteria Proper digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Mekanisme dan Kriteria Proper  
 Sumber : KLHK (2015) dalam (Hadi, 2019b)

Dengan adanya pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2019 dan banyaknya bencana alam yang menimpa Indonesia seperti banjir, gunung meletus dan tanah longsor, maka KLHK menambahkan aspek kebencanaan pada Mekanisme Proper di tahun 2020 dan disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Proper, dimana untuk kriteria *beyond compliance* memasukkan *Life Cycle Assesment* (LCA) sebagai aspek baru menggantikan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) sekaligus sebagai dasar untuk lima aspek Sumber Daya Alam (SDA), aspek lainnya adalah keanekaragaman hayati (kehati), *comdev* dan kriteria tanggap kebencanaan yang memasukkan kontribusi Perusahaan dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 baik kepada karyawan dan masyarakat. SML dan DRKPL sesuai mekanisme *beyond compliance* Proper tahun 2021 digunakan sebagai *passing grade* bagi perusahaan yang lolos pada kepatuhan Proper Biru untuk peraih Proper Hijau dan Proper Emas. Perbandingan mekanisme perubahan Proper tahun 2020 dan tahun 2021 disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2 Perbandingan Kriteria Proper 2020 dan 2021  
 Sumber: KLHK (2021)

Perusahaan dengan peringkat Proper yang baik, menjadi indikator dari kemampuannya mengelola lingkungan dan membina hubungan baik dengan masyarakat serta mampu mewujudkan *social acceptance* (penerimaan masyarakat) atas kehadiran perusahaan dan menjamin keberlanjutan usaha (*corporate sustainability*). Secara internal, perusahaan yang berperingkat Proper baik, mampu mewujudkan lingkungan kerja yang baik dan menjamin kenyamanan serta kesehatan para karyawan. Dengan dampak positif, baik secara eksternal maupun internal, sesungguhnya hal ini adalah demi perusahaan juga, karena membantu perusahaan dalam mencapai produktivitas yang tinggi dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Di samping itu internalisasi biaya pengelolaan lingkungan, penerapan produksi bersih, 3R, membuktikan efisiensi dalam produksi sehingga perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif.

Proper membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan cita-cita dari PBB yang telah menggulirkan SDGs atau pembangunan berkelanjutan untuk masyarakat global. Pada tahun 2020 terdapat 2038 perusahaan yang mengikuti Proper. Hasil penilaian

menunjukkan tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup mencapai 79,93% atau sebanyak 1.629 perusahaan yang mendapatkan Proper Biru, perusahaan yang lebih dari taat yang mendapatkan Proper Hijau 6,13% (125 perusahaan) dan perusahaan yang telah mempraktekan keunggulan lingkungan dalam bisnisnya / *environment excellence* dengan mendapatkan Proper Emas sebanyak 1,57% (32 perusahaan). Dari hasil, penilaian tersebut, Proper telah mencatat berbagai penghematan pemakaian sumber daya alam dan inovasi dunia usaha (KLHK, 2020).

Di era Industri 4.0 dan sekaligus sebagai implementasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Proper juga telah menerapkan pelaporan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan mengembangkan Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (Simpel) yaitu sebuah sistem pelaporan *online* menggantikan sistem pelaporan manual atau cetak, sehingga mengurangi pemakaian kertas, tinta printer, biaya dinas, transportasi darat dan udara serta ikut andil dalam mengurangi emisi. Salah satu contoh perusahaan yang merasakan dampak dari penerapan Simpel ini adalah Pertamina yang telah banyak menghemat pemakaian kertas 140 ton/tahun dan efisiensi biaya Rp 2,5 milyar (KLHK, 2019). Data tahunan yang dimasukkan ke Simpel tersimpan di bank data dan dapat dijadikan sumber data dalam pengelolaan lingkungan selanjutnya, sehingga memudahkan perusahaan melaporkan dan mengelola data lingkungan. Sampai tahun 2019 telah terdaftar 6.753 perusahaan dalam Simpel dan 3.945 perusahaan yang aktif melakukan pelaporan pengelolaan lingkungan. (KLHK, 2019). Di sisi SDA pada Tabel 2 dapat dilihat hasil kinerja Proper 2020 untuk Aspek Abiotik (KLHK, 2020).

Tabel 2 Hasil Kinerja Proper 2020 untuk Aspek Abiotik

No	Aspek	Jumlah	Satuan
1	Efisiensi energi	430.244.918	Giga Joule (GJ)
2	Penurunan beban pencemaran	46.160.473	Ton
3	3R limbah non B3	5.029.181	Ton
4	3R Limbah B3	16.403.947	Ton
5	Penurunan Emisi Konvensional	5.942.514	Ton
6	Efisiensi Air	339.529.963	m <sup>3</sup>
7	Penurunan Emisi GRK	131.238.206	Ton CO <sub>2</sub> e

Sumber (KLHK, 2020), dikompilasi peneliti

Dari Tabel 2 di atas nampak bahwa mengelola lingkungan hidup dengan melakukan penghematan pada aspek abiotik itu mendatangkan keuntungan finansial bagi perusahaan. Penghematan-penghematan tersebut antara lain adalah berkat berbagai inovasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan peserta Proper, didorong KLHK melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan implementasi Proper. Yang menggembirakan adalah peningkatan hasil-hasil inovasi dari perusahaan peserta Proper 2020 yang berupa inovasi dari 5 aspek SDA, Kehati dan *comdev*, seperti disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Inovasi Perusahaan Peserta Proper 2020

No	Aspek	Jumlah Inovasi			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Efisiensi energi	50	135	170	142
2	Penurunan Emisi	73	72	115	111
3	3R Limbah B3	64	95	117	119
4	3R Limbah Non B3	48	53	110	105
5	Efisiensi air dan penurunan beban pencemaran	81	65	113	114
6	Pemberdayaan Masyarakat	43	56	57	100
7	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	42	66	112	115
	Total	401	542	794	796

Sumber: KLHK (2020), dikompilasi peneliti.

Dari Tabel 3 tersaji dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 jumlah inovasi yang dilakukan perusahaan meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan 796 inovasi. Hasil inovasi tersebut mampu menghemat anggaran sebesar 107,135 trilyun. Proper juga bermakna,

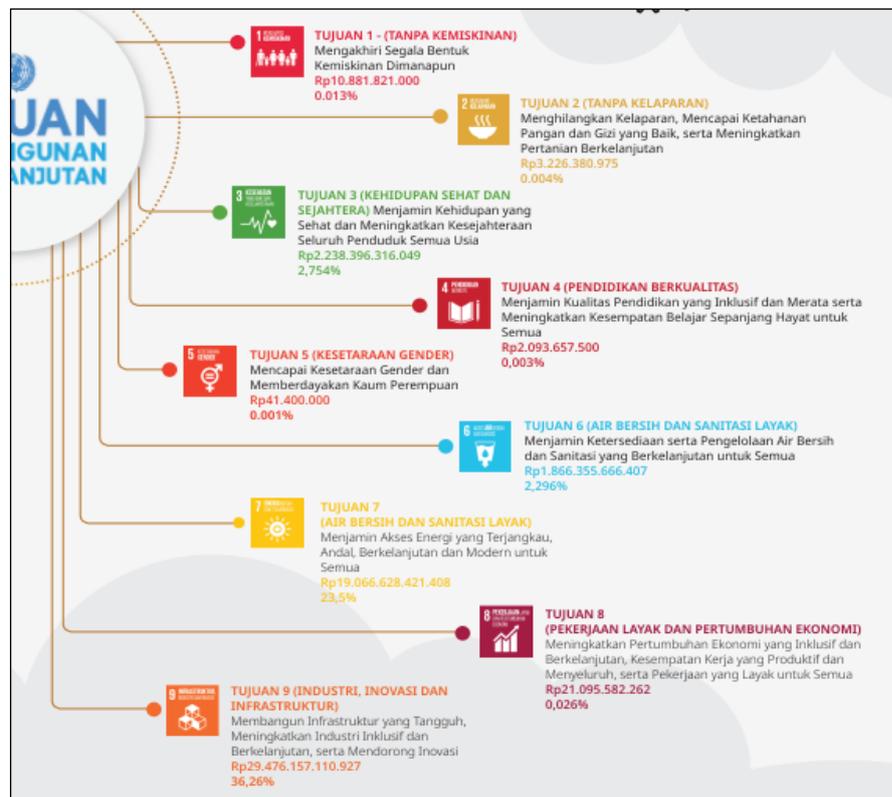
berhasil menggeser program CSR *charity* / program bagi-bagi sembako dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat untuk beralih ke program CSR yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. Tercatat dana yang bergulir di masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat mencapai Rp 6,21 triliun. Dana bergulir di masyarakat dari tahun 2017 sampai tahun 2019 jumlahnya meningkat terus namun mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Sesuai hasil observasi banyak perusahaan melakukan *switching* program dan pengalihan anggaran untuk membantu mengatasi pandemi covid-19, baik di internal untuk karyawan maupun eksternal perusahaan untuk masyarakat sekitarnya, hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.



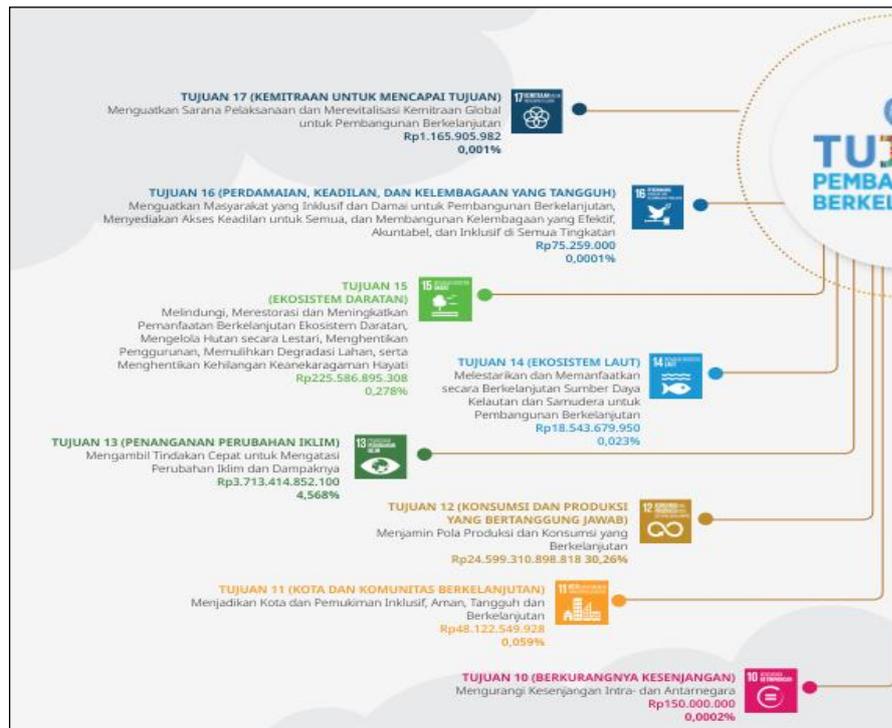
Gambar 3 Dana bergulir di masyarakat dari peserta proper 2017 – 2020  
 Sumber : KLHK (2020)

Selain membantu mereka yang terdampak pandemi, program-program Proper bila dikaitkan dengan SDGs, atau sumbangsih dunia usaha untuk ambil bagian dalam pencapaian SDGs tahun 2020 adalah Rp. 81,29 trilyun, dan di tahun 2019 tercatat Rp. 50,32 trilyun, atau naik 61,55 % dibanding tahun sebelumnya (KLHK, 2020). Penyebarannya di 17 pilar SDGs disajikan dalam Gambar 4 tentang kontribusi Proper dalam pencapaian SDGs pilar 1-9 dan Gambar 5 tentang kontribusi Proper dalam pencapaian SDGs pilar 10-17. Salah satu komponen Proper bagi perusahaan yang ingin meraih peringkat Proper hijau atau Propert emas adalah melakukan *Community Development (Comdev)* atau pemberdayaan masyarakat.

Perusahaan didorong untuk membantu tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat antara lain dengan cara membayar pajak, karena dengan membayar pajak berarti perusahaan mendukung pembangunan nasional untuk mensejahterakan rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terpenting negara. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sebagai salah satu subjek pajak (Khairunisa,et al, 2017). Semakin tinggi CSR yang dilakukan suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya karena perusahaan yang melakukan CSR memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk membangun hubungan yang baik dengan *stakeholder*, seperti tanggung jawab kepada pemerintah dengan cara membayar pajak sesuai dengan kewajibannya tanpa tindakan penghindaran pajak (Khairunisa,et al, 2017). Sebagai contoh PKT telah mendapatkan beberapa kali penghargaan dari bea dan cukai Bontang pada tahun 2018 dan 2019 sebagai pembayar pajak terbaik (PKT,2020).



Gambar 4 Kontribusi Proper dalam pencapaian SDGs pilar 1 – 9  
Sumber : KLHK (2020)



Gambar 5 Kontribusi Proper dalam pencapaian SDGs pilar 10 - 17  
 Sumber : KLHK (2020)

Tanggung jawab sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam mengentaskan kemiskinan termasuk tugas perusahaan. CSR merupakan manifestasi atau perwujudan dari etika bisnis. CSR juga membantu melaksanakan amanat Undang Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) tahun 1945 yakni mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) tidak hanya menjadi tugas negara tetapi juga tugas institusi bisnis melalui CSR sebagaimana nampak dalam Gambar 6 tentang dari *Welfare State* ke *Welfare Pluralism*.



Gambar 6 Dari Welfare State ke Welfare Pluralism  
 Sumber: Krisdyatmiko (2017) dalam Hadi (2019b)

Sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait CSR. Hasil penelitian Logho.M.A., et al., (2017) misalnya meneliti bahwa CSR yang dilakukan perusahaan adalah dalam hal pemberian beasiswa, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat bidang jasmani dan rohani. Hasil penelitian Xiaoye Chen dan Rong Huang (2018) mengungkapkan dampak CSR mempengaruhi konsumen dalam membeli produk perusahaan. Hasil penelitian Chin-Chen Yeh, et al., (2011) adalah CSR mempererat hubungan perusahaan dengan *stakeholder* dan CSR dipandang sebagai investasi yang dapat mengarah pada pencapaian tujuan kinerja yang berkesinambungan. Ketiga hasil penelitian tersebut saling melengkapi dan memberikan citra positif terhadap perusahaan. Adapun hasil penelitian Martin Loosemore & Benson Teck Heng Lim (2018) menemukan bahwa CSR di bidang konstruksi dan teknik bersifat informal, kurang inovatif, hanya patuh pada sistem sehingga hubungan dengan masyarakat melalui inisiatif CSR menjadi sia-sia. Pelaksanaan CSR melalui pemberdayaan masyarakat atau *comdev* seperti misalnya penelitian Gaelle Duthler dan Ganga S. Dhanesh (2018) tentang "The Role of Corporate Social Responsibility (CSR) and Internal CSR Communication in Predicting Employee engagement". Penelitian Jamal A. Nazari, et.al., tentang "Assessing social and environmental performance through narrative complexity in

*CSR reports*”; penelitian Sarah George Lauwo, et al, tentang “*Corporate social responsibility reporting in the mining sector of Tanzania (Lack of) government regulatory controls and NGO activism*”; penelitian Isaac K. Ngugi di UK tentang “*Co-creating Value in the Dyadic Relationships of Small and Large Firms in the Agri-food Sector*”; penelitian Boubakary dan Doumagay Donatienne Moskolaï tentang “*The influence of the implementation of CSR on business strategy: An empirical approach based on Cameroonian enterprises*”; penelitian Takashi Fukushima tentang “*The significance of CSR in A/R CDM promotion from the case study of Japan*”. Selain itu juga terdapat berbagai tulisan mengenai berbagai bentuk CSR seperti misalnya pemberdayaan masyarakat melalui aplikasi Keramba Jaring Apung (KJA) bagi masyarakat pesisir, penerapannya dapat mengacu pada hasil penelitian Insani.M.T.S, et al, yang meneliti Pengembangan Perikanan Budi Daya Kerapu Bebek (*Chromilepses altivelis*) di Pulau Gebe di Halmahera Tengah, Maluku Utara hasilnya masyarakat pembudidaya ikan mampu memelihara bibit ikan kerapu bebek hasil pemijahan buatan, memanen dan menjual hasil panennya; penelitian Sachoemar, S.I yang meneliti analisis daya dukung lingkungan Perairan Marikultur Batam Estet (BME) Batam hasilnya perairan Nguan Batam merupakan perairan oligotrofik - mesotrofik yang kandungan haranya masih rendah / belum tercemar; penelitian Hastari, I.F., et al, meneliti Analisis Kesesuaian Budidaya KJA Ikan Kerapu menggunakan Sig di perairan Ringgung Lampung hasilnya dari total area seluas 99.168,5 ha yang digunakan untuk budidaya ikan kerapu di KJA hasilnya 85,94% sangat sesuai, 5,64% sesuai dan 8,42% tidak sesuai; penelitian Ulfah, M., et al, meneliti Daya Dukung Lingkungan Perairan Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau untuk Kegiatan Budidaya Ikan Dalam Keramba Jaring Apung, hasilnya perairan di Mantang kondisinya baik sesuai dengan Permen LH Nomor 51 tahun 2004 tentang baku mutu air laut, dimana PH dan DO di bawah standart namun untuk parameter phosphate menunjukkan “*alarm condition*”

(perlu hati-hati), hasil perhitungan untuk daya dukung di Mantang masih dapat mengakomodir 650 buah KJA. Hasil penelitian mereka dapat dijadikan sebagai referensi untuk kegiatan budidaya ikan pada KJA di tempat lain mengenai persyaratan KJA, kegagalan dan keberhasilannya agar di tempat lainnya bisa melakukan mitigasi atau perbaikannya. Telah diketahui bersama bahwa masyarakat nelayan tergolong masyarakat marginal dan miskin (Nikijuluw,2001) sehingga banyak program diinisiasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat nelayan diantaranya: hasil penelitian dari Duriyanto.R., et al.,(2014) tentang Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Klinik Iptek Mina Bisnis (KIMbis) yaitu Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan), hasil penelitian menunjukkan, bahwa kegiatan KIMBis belum maksimal masih terdominasi pelatihan untuk masyarakat dan keterlibatan *stakeholders* dipahami tidak terjadi secara optimal, namun perkembangan kualitas sumberdaya manusia lebih baik. Penelitian lain mengenai *Analysis of Empowerment Fisherman Community in Tobelo, North Halmahera* dilakukan oleh Sipahelut.M.,et.al.,(2010) hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) telah memicu perubahan perkembangan sosial budaya, teknologi, ekonomi dan kelembagaan masyarakat pesisir di Kabupaten Halmahera Utara, namun kedua penelitian tersebut belum menyebutkan tentang keberhasilan memandirikan masyarakat nelayan yang didampingi.

Untuk pengelolaan sampah dapat menggunakan acuan dari hasil penelitian Rasa,S and Ahmad,J (2016) yang meneliti *Composting Process Review* dan penelitian Setyaningsih.E.,et.al., (2017) yang meneliti Kompos Daun Solusi Kreatif Pengendali Limbah. Hasil keduanya saling menguatkan. Beberapa peneliti menyarankan pelaksanaan CSR diarahkan ke CSV seperti yang dikemukakan oleh peneliti HwY-Chang Moon dan Jimmyn Parc di Seoul (2019) yang meneliti *Shifting Corporate Social Responsibility (CSR) to*

*Corporate Social Opportunity Through Creating Shared Value (CSV)*. Hasilnya mengusulkan tipologi baru untuk kegiatan sosial perusahaan yang bermanfaat dalam meningkatkan daya saing sekaligus mendukung manfaat sosial secara bersamaan. Hasil penelitian Yeon W. Lee (2019) menguatkan penelitian Moon and Parc tentang usul perubahan pelaksanaan CSR perusahaan ke CSV. Bahkan beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait penerapan CSV di beberapa perusahaan seperti Lise Lodsgård dan Annabeth Aagaard (2017) yang meneliti *Creating Value through CSR Across Company Functions and NGO Collaborations A Scandinavian Cross-Industry Case Study in Denmark*. Selain itu Yi-Ru Regina Chen, et. al (2020) dan Priyan Senevirathna yang hasilnya saling melengkapi satu dengan lainnya dimana kegiatan sosial dihubungkan dengan kegiatan ekonomi perusahaan agar mendapatkan keuntungan pada saat yang bersamaan. Sejauh ini penelitian yang focus pada CSR sudah banyak dilakukan seperti yang dilakukan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di RT-07 Kelurahan Guntung Kota Bontang dan di pesisir Tanjung Limau Kelurahan Bontang Baru Kota Bontang, namun yang mengkritisi dasar teori tipologi *comdev* yang digagas oleh Matarrita-Cascante-Brennan (2012) belum ada, sehingga menjadi alasan dilakukannya penelitian ini.

PKT adalah perusahaan pupuk urea yang menggunakan gas alam metana ( $\text{CH}_4$ ) termasuk perusahaan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Gas alam metana merupakan bahan baku utama yang digunakan untuk membuat amoniak ( $\text{NH}_3$ ). Dalam proses pembuatan amoniak dihasilkan hasil samping gas karbon dioksida ( $\text{CO}_2$ ). Selanjutnya amoniak dan gas karbon dioksida diproses dengan tekanan dan suhu yang tinggi menghasilkan pupuk urea, yang menjadi bisnis utama dari PKT. Kapasitas produksi pupuk urea sebagai pupuk hara tunggal sumber unsur nitrogen ( $\text{N}_2$ ) yaitu 3,43 juta ton/tahun, produksi amoniak 2,74 juta ton/tahun dan produksi pupuk NPK sebagai pupuk hara majemuk yang mengandung

unsur nitrogen (N<sub>2</sub>), unsur phosphor (P) dan unsur kalium (K) adalah 350.000 ton/tahun. PKT merupakan produsen pupuk urea terbesar di Indonesia yang berada dalam satu area Komplek Industri PKT dan Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate (PT. KIE). PKT mempunyai tugas memenuhi kebutuhan pupuk urea subsidi 2 per 3 wilayah Indonesia mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan sekitarnya, Nusa Tenggara sampai Papua. PKT merupakan anak perusahaan (Anper) dari *Pupuk Indonesia Holding Company* (PIHC) bersama 4 pabrik pupuk lainnya yaitu PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang Sumatra Selatan, PT. Petro Kimia Gresik (PKG) di Gresik Jawa Timur, PT. Kujang Cikampek (PKC) di Cikampek Jawa Barat dan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Aceh.

PIHC merupakan perusahaan BUMN dengan pemegang saham utamanya Menteri BUMN. Selanjutnya PIHC beserta Anak Perusahaan (Anper)-nya wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang biayanya diambilkan dari keuntungan perusahaan, besarnya biaya ditentukan oleh rapat pemegang saham. Dengan demikian perusahaan di Indonesia khususnya PKT turut berperan dalam pencapaian TPB melalui program PKBL. Dalam prakteknya PKT melaksanakan Program Kemitraan (PK) dengan memberikan bantuan modal pinjaman dengan bunga ringan untuk masyarakat sekitar perusahaan yang mampu berusaha namun belum bisa mengajukan kredit ke bank, adapun program Bina Lingkungan (BL) ditujukan pada masyarakat yang rentan dan marginal melalui program pengembangan masyarakat (*comdev*) dengan pendampingan secara khusus oleh staf dari Departemen CSR PKT dan *Community Development Officer* (CDO) untuk pelaksanaan program CSR di masing-masing wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil *social mapping*.

## 2. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Pupuk Kalimantan Timur

Menurut Kartini, (2013) CSR sesungguhnya merupakan upaya serius dari manajemen perusahaan untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif terhadap *stakeholder* dalam pembangunan berkelanjutan. Perusahaan memang memiliki tanggung jawab sosial namun hal itu terbatas pada wilayah dampaknya serta terbatas pada *stakeholder*-nya. Dampak negatif perusahaan bisa jadi sudah dimulai ketika perusahaan belum beroperasi misalnya masa eksplorasi dan konstruksi. Sudah seharusnya CSR dilakukan oleh perusahaan sejak periode awal ia bersinggungan dengan *stakeholder*-nya.

Menurut Meizar, et al., (2020) PKT telah melakukan pengembangan masyarakat sejak sebelum beroperasinya Pabrik-1 tahun 1984. Pabrik-1 adalah pabrik yang pertama kali dibangun oleh PKT, saat ini (tahun 2020) PKT sudah membangun sampai dengan Pabrik-7. Kegiatan wilayah yang diinisiasi PKT dimulai tahun 1983 saat era kepemimpinan Kotan Pasaman sebagai Direktur Utama PKT yang kedua. Pertama-tama PKT memberikan berbagai jenis pelatihan dalam rangka menunjang kelancaran proyek, antara lain: pelatihan bagi tukang las, sopir, tukang kayu, penjahit, perbengkelan, pedagang kaki lima yang ditempatkan di koperasi pujasera PKT bahkan masih ada yang bertahan sampai saat ini misalnya pedagang martabak, para pengrajin dan berbagai profesi lainnya yang melibatkan masyarakat sekitar agar turut serta sebagai pendukung dalam pembangunan Pabrik-1. Semua profesi dan keahlian dibina sampai akhirnya mereka bisa membuat usaha sendiri sebagai kontraktor-kontraktor kecil. Setelahnya PKT juga membina para petani setempat yang bermukim di sekitar perusahaan, tujuannya agar bahan pangan karyawan dan masyarakat Bontang dipenuhi oleh petani setempat.

PKT melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk memenuhi 2 kewajiban sebagai kepatuhan terhadap hukum (*compliance*) yaitu: 1) sebagai pemenuhan terhadap UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 74 ayat 1 bahwa perusahaan yang menggunakan sumber daya alam sebagai bahan baku harus melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; 2) sesuai matrik RKL-RPL pada dokumen lingkungan PKT (Amdal / UKL-UPL) bahwa dua kelurahan yaitu Kelurahan Guntung dan Kelurahan Lhoktuan Kecamatan Bontang Utara merupakan area eksternalitas negatif yang terkena dampak langsung dari kegiatan bisnis PKT, sehingga PKT wajib melaksanakan program CSR di kelurahan tersebut sebagai kompensasi.

Selain 2 kewajiban tersebut di atas, PKT juga melaksanakan program CSR di ring 2 sebagai *beyond compliance* di luar kelurahan Guntung dan Kelurahan Lhoktuan yaitu di Kelurahan Api-Api dan Kelurahan Tanjung Laut Indah serta di Km 8 poros Bontang -Sangatta. Selanjutnya PKT sebagai Anper dari PIHC, pemegang saham PIHC adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahwa setiap tahun seluruh perusahaan di bawah BUMN wajib ikut dalam program BUMN hadir untuk negeri. Program BUMN hadir untuk negeri biasanya dikemas dalam program CSR bersama di daerah yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN yang termasuk wilayah terdepan, termiskin dan tertinggal (3T). Setiap tahun lokasi wilayahnya berbeda-beda. Bentuk CSR yang dilakukan biasanya tergolong CSR bentuk *charity* dan CSR bentuk infrastruktur seperti: pembangunan rumah ibadah, pembangunan jalan, bedah rumah di daerah 3T tersebut dan lainnya. Dengan demikian melalui program BUMN hadir untuk negeri bisa dikatakan wilayah CSR PKT tersebar di beberapa daerah di Indonesia yang ditunjuk oleh Pemerintah. PKT melaksanakan program CSR bukan sekedar mematuhi peraturan perundangan dan *beyond compliance* Proper namun lebih dari hal itu bahwa program CSR PKT dapat dikatakan sebagai bagian dari *environmental safe guard*

*system*, agar PKT mendapatkan *lisensi sosial* dari masyarakat sekitarnya, sehingga PKT dapat beroperasi secara aman, berkelanjutan dan masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan membawa manfaat bagi masyarakat sekitarnya terutama masyarakat di ring 1 yaitu Kelurahan Guntung, Kelurahan Lhoktuan dan Kelurahan Bontang Baru (masyarakat pesisir terdekat dengan PKT).

Program CSR PKT sudah berjalan sejak pabrik didirikan pada 7 Desember 1977 yaitu berupa pembangunan jalan dari perumahan karyawan di *Personal Community 6 (PC-6)* PKT menuju Kantor PKT yang berjarak 6 Kilometer (Km) dari PC-6 dengan bentuk CSR infrastruktur di bawah Departemen PKBL. Pelaksanaan program CSR PKT tidak disertai dengan *social mapping*, alokasi dananya digunakan untuk membiayai program *Charity* sekitar 50%. Untuk program *infrastruktur* dengan alokasi dana sekitar 40% antara lain berupa pembangunan akses jalan untuk karyawan menuju tempat kerja, pembangunan akses jalan untuk masyarakat dari Lhoktuan sampai Jalan Pupuk Raya sepanjang 11 km. Adapun program *Capacity building* dan *empowerment* (pemberdayaan) dilaksanakan dengan biaya sekitar 10%. Program *capacity building* berupa pelatihan-pelatihan ini sebagian besar datangnya dari perusahaan tanpa melibatkan masyarakat dalam perencanaan, misalnya pelatihan menjahit dan kursus kecantikan yang tidak ada pendampingan setelah pelatihan, adapun CSR bentuk pemberdayaan sangat kecil alokasi biayanya.

Dari hasil observasi, karyawan PKBL yang mengurusinya bina lingkungan khususnya, menjalankan tugas dari atasan / ide seseorang yang dianggap baik, kemudian membuat program kerja dan penerapan di lapangan dengan melibatkan beberapa orang yang dianggap mampu menjalankan program tersebut, jadi lebih banyak ke perseorangan yang dianggap mampu. Tidak ada pemantauan dan evaluasi (*monev*). Sebatas seremonial saja, setelah selesai seremonial dibuat laporan ke atasan oleh staf yang diberi tugas tersebut. Program CSR ke

masyarakat sekitar tidak ada pendampingan program. Program-program CSR yang dijalankan PKT pada awalnya seringkali sesuai dengan keinginan pucuk pimpinan perusahaan tanpa didahului dengan *social mapping* sebelum PKT menerapkan *beyond compliance* Proper.

Sesuai Syarief (2011) PKT mempunyai Master Plan CSR yang disusun pada tahun 2011 oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) yang isinya berupa kumpulan program-program CSR PKT atau berdasarkan praktek CSR yang sudah dijalankan oleh PKT, sehingga belum mengacu pada hasil *social mapping*. Dalam Master Plan CSR PKT terdapat 6 (enam) pilar, yang meliputi:

1. pembangunan kapital manusia,
2. penguatan ekonomi,
3. pengembangan sinergi dan kemitraan,
4. penguatan tata kelola perusahaan,
5. pengelolaan lingkungan berkelanjutan
6. peningkatan komunikasi publik.

Hasil observasi, CSR PKT dikoordinir oleh Komite CSR di bawah Sekretaris Perusahaan (Sekper) yang anggotanya dari beberapa unit kerja terkait seperti Departemen Lingkungan Hidup (LH), Departemen Hubungan Masyarakat (Humas) dan Departemen PKBL. Pelaksana CSR PKT tersebar di beberapa Departemen. Setiap Departemen memprogramkan CSR sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri dengan anggaran masing-masing Departemen, kemudian dilaporkan ke Komite CSR, sehingga tidak ada keberlanjutannya ataupun *outcome*-nya pada masyarakat. Menurut Kartini, (2013) membuat organisasi CSR yang menempel di unit kerja tertentu (*bold on*) dan bukan terintegrasi (*bold in*) dilihat sebagai sumber kesalahan besar dari perusahaan, karena seluruh bagian perusahaan

sesungguhnya terlibat dalam manajemen CSR. Seluruh bagian perusahaan harus memahami CSR dan bertindak bersama terkoordinasi sesuai dengan komitmen CSR yang telah dinyatakan oleh manajemen puncaknya. Sebelum tahun 2015 struktur organisasi PKT belum ada unit khusus yang menangani CSR. Kegiatan CSR dikoordinir oleh Komite CSR, yaitu struktur organisasi bentukan yang diketuai oleh Sekretaris Perusahaan, tugasnya antara lain: (a)mengkoordinir Departemen LH, Departemen Humas dan PKBL yang melaksanakan kegiatan CSR. (b)mengadakan rapat koordinasi internal CSR dengan mengundang ketiga Departemen di atas. (c)mengumpulkan laporan kegiatan CSR dari ketiga Departemen tersebut di nomor 1. (d)membuat laporan CSR ke internal perusahaan dan eksternal (Pemkot). (e)mengikuti / mewakili perusahaan pada rapat eksternal CSR yang diselenggarakan oleh Pemkot Bontang / instansi lain.

Dari pengalaman tersebut Departemen yang banyak melaksanakan CSR atau membantu masyarakat adalah Departemen PKBL maka Departemen PKBL tersebut yang lebih dikenal oleh masyarakat bukan perusahaannya. Karyawan PKT yang berada di Departemen Humas, PKBL dan LH yang melaksanakan program CSR sesuai dengan permintaan masyarakat dan proposal yang masuk serta keinginan dari setiap Departemen yang ditugasi perusahaan. Program CSR yang dilakukan misalnya memberi bantuan ke masyarakat secara tunai berupa uang, membantu sunatan massal, membangun infrastuktur yang diperlukan masyarakat, mengadakan senam pagi bersama, pemeriksaan kesehatan, penyediaan makanan sehat bagi balita, ibu hamil dan lansia pada setiap bulan secara rutin. Masing-masing Departemen memberikan bantuan ke masyarakat secara individu atau per orang sehingga seolah-olah memperkaya orang tertentu, bahkan muncul pendapat bahwa bantuan dari perusahaan adalah merupakan milik pribadi. Alhasil dari hal tersebut, bila perusahaan membantu kelompok masyarakat tertentu berupa peralatan produksi, maka masyarakat tidak

mengusahakan peralatan produksi tersebut untuk alat kerja, namun mereka ingin mendapatkan hasil langsung dari apa yang kelompok telah terima yaitu dengan menjual peralatan produksi tersebut. Hasil penjualan dibagi rata oleh anggota kelompok tersebut atau peralatan produksi dibagi rata ke anggota kelompok, setelahnya mereka menjual sendiri-sendiri kepada kelompok nelayan lain dan hasilnya mereka nikmati sendiri-sendiri sesuai bagiannya (Meizar.et.al., 2020).

PKT baru mengetahui ketika PKT mengikuti Proper peringkat *beyond compliance* tahun 2015 bahwa CSR yang dilakukannya pada masyarakat masih tergolong CSR bentuk *Charity, Infrastruktur dan Capacity Building* belum sampai menyentuh ke ranah pemberdayaan masyarakat karena semua hal yang dilakukan hanya berhenti saat penyerahan atau seremonial tanpa pendampingan, sebagai contohnya seremonial penyerahan 1000 bibit pohon durian ke warga Kelurahan Guntung yang dilakukan tahun 2014 oleh PKT yang merupakan program dari Departemen Humas namun tidak ada hasilnya (PKT, 2020). Masyarakat sekitar perusahaan dengan adanya CSR *charity* merasa senang karena bantuan dapat diterima secara langsung tanpa harus bersusah payah, bila bantuan telah habis mengajukan proposal lagi ke perusahaan untuk proyek tertentu yang pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan biaya dari perusahaan, hal ini berlangsung terus sampai tahun 2015. Tidak adanya pendampingan program yang dijalankan oleh masyarakat, sehingga jalannya program CSR tergantung niat dan semangat masyarakat tersebut. Bisa dikatakan bahwa CSR PKT pelaksanaannya tergantung pada anggota masyarakat secara individu / kelompok masyarakat. Bila niat individu / kelompok masyarakat baik terhadap perusahaan maka program CSR tersebut berjalan dengan baik dan berhasil, namun bila niat masyarakat tersebut kurang baik maka bantuan tersebut tidak berlangsung lama hanya bertahan beberapa minggu saja dan setelahnya tidak nampak lagi.

Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PKT kala itu sesuai dengan proposal yang diajukan oleh masyarakat, di samping itu PKT tidak mempunyai *social mapping* sampai dengan tahun 2015, sehingga CSR yang dilaksanakan bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat namun berdasarkan keinginan masyarakat secara spontan dan sporadis serta keinginan pembuat program dari PKT. Hasil dari semua itu masyarakat menjadi tergantung kepada perusahaan karena dengan mengajukan proposal permohonan bantuan apapun kepada perusahaan, maka perusahaan akan memenuhinya segera. Masyarakat bisa mendapatkan bantuan langsung tunai, tanpa harus berusaha bekerja dengan keras. Bila perusahaan terlambat merespon proposal yang diajukan masyarakat, maka akan terjadi aksi protes / demo ke perusahaan dengan mengangkat isu pencemaran lingkungan laut yang menyebabkan banyak ikan kecil mati. Isu lingkungan tersebut diangkat ke media massa sehingga membuat image buruk perusahaan dimata masyarakat. Namun pada akhirnya diketahui setelah mereka menjadi binaan CSR PKT akhir tahun 2016 bahwa isu lingkungan yang dahulu mereka angkat sebenarnya tidak benar kalau perusahaan mencemari lingkungan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan budidaya ikan kerapu dan lobster di Keramba Jaring Apung (KJA) di Tanjung Limau dengan lokasi berseberangan tidak jauh dengan kompleks industri PKT dan Kawasan Industri KIE dapat berlangsung dengan baik. Keberadaan KJA tersebut sekaligus sebagai bio indikator, bahwa PKT telah mengelola limbah cairnya yang masuk ke badan air dengan baik, memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan izin yang diberikan oleh Pemerintah (*environmental compliance*).

Hasil monitoring analisis kualitas air laut baik secara fisika, kimia dan mikrobiologi selama 4 Tri Wulan (TW) dalam tahun 2021 nilainya masih di bawah baku mutu air laut (baik) yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai Permen Lingkungan Hidup (LH) Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut, kecuali parameter amoniak ( $\text{NH}_3$ ) pada TW I Tahun 2021

yang melampaui baku mutu yaitu 0,36 ppm (baku mutu 0,3 ppm) (PKT,2021). Untuk hasil analisa oksigen terlarut (Dissolved Oksigen) di laut sekitar KJA pada Jumat 22 Juli 2022 adalah 6,93 ppm (baku mutu > 5 ppm) hasil analisa baik sehingga perairan laut di sekitar KJA Tanjung Limau Bontang yang berdekatan dengan PKT kondisinya baik untuk program budidaya ikan kerapu dan lobster (PKT, 2022). Demikian juga hasil observasi secara fisik di perairan sekitar KJA tidak ada *blooming algae* mulai awal program hingga saat ini, karena pakan ikan bukan berasal dari pellet / pakan buatan yang mengandung protein tinggi, pakan ikan di KJA adalah ikan kecil/rucah, bila rucah tersisa akan lolos dari jaring KJA dan dimakan oleh ikan-ikan di luar jaring KJA.

Program-program CSR PKT antara lain:

1. peduli Pendidikan dengan memberikan beasiswa dari SD sampai jenjang perguruan tinggi.
2. peduli kesehatan bekerjasama dengan Puskesmas setempat dan penyediaan mobil ambulance untuk keliling ke warga masyarakat sebulan sekali untuk pemeriksaan kesehatan.
3. peduli lingkungan dengan komitmen menanam terumbu buatan minimal 500 buah setiap tahun selama 10 tahun di perairan laut Tobok Batang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.
4. pembuatan biopori bersama warga sekitar perusahaan untuk mengurangi banjir
5. penanaman mangrove di daerah peisisir Kedindingan yang telah ditetapkan oleh Pemkot Bontang
6. program “jendela dunia” yaitu program pemeriksaan mata bagi murid-murid SD sekitar perusahaan bekerja sama dengan dokter puskesmas setempat dan RS PKT, bila

hasil pemeriksaan membutuhkan kacamata untuk membaca, maka dibeli oleh perusahaan.

7. program CSR yang dilaksanakan di daerah lain seperti di Samarinda, Balikpapan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
8. program CSR bersama BUMN lainnya di Indonesia yang dikemas dalam program “BUMN hadir untuk negeri” yang diadakan setiap tahun dengan daerah yang telah ditetapkan dari Kementerian BUMN, biasanya difokuskan di masyarakat daerah termiskin, tertinggal, terdepan (3T) di wilayah Indonesia (Meizar.et.al., 2020).

Selain program di atas PKT mempunyai beberapa CSR unggulan di area sekitar perusahaan yaitu:

1. Toga Enggang Herbal di RT-06 Kelurahan Guntung yang merupakan area terdampak, program dimulai tahun 2015 dan pada tahun 2018 sudah *exit program*
2. Kompos berbasis masyarakat di RT-07 Kelurahan Guntung, program dimulai tahun 2016, tahun 2019 sudah *exit program*
3. Ma’rifah Herbal di Kelurahan Lhoktuan yang merupakan replikasi dari Toga Enggang Herbal dari Toga Enggang Herbal RT- 06 Kelurahan Guntung.
4. Inkubator Bisnis (Inbis) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kelurahan Gunung Elai.
5. Kampung Aren berdaya ramah difabel (*different abel*) yang merupakan program inovasi sosial yang melibatkan masyarakat kampung aren di Kelurahan Api-Api Bontang.
6. *Better Living in Malahing* di Kelurahan Bontang Baru Indah

7. Budidaya Ikan Kerapu dan Lobster di Keramba Jaring Apung (KJA) Tanjung Limau yang masuk Kelurahan Bontang Baru. Budidaya ikan kerapu di KJA ini sudah direplikasi di masyarakat Gusung RT-22 daerah pesisir yang masih termasuk kelurahan Guntung pada Oktober 2018, direplikasi di kelurahan Bontang Kuala pada akhir Desember 2019 (PKT, 2020) dan direplikasi oleh Bank Indonesia Cabang Samarinda di Pulau Miang Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Bentuk-bentuk program CSR PKT disesuaikan dengan ketentuan Proper yaitu *Charity*, *Infrastruktur*, *Capacity Building* dan *Empowerment* yang diarahkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat, dimulai dengan menyusun *social mapping* baik untuk masyarakat yang tinggal di daratan sekitar PKT yaitu masyarakat Guntung dan Lhoktuan serta masyarakat yang tinggal di pesisir pulau Gusung, Malahing dan Tanjung Limau. Menurut Krisdyatmiko, (2017) pembelajaran yang diperoleh perusahaan melalui Proper yaitu telah menggeser orientasi program CSR yang semula bersifat karikatif (*charity*) menjadi pemberdayaan masyarakat (*empowerment*).

## B. Perumusan Masalah

Sebelum tahun 2015 PKT belum menerapkan *beyond compliance Proper* sepenuhnya, *beyond compliance* hanya dilaksanakan di sisi Sumber Daya Alam (SDA) seperti penerapan efisiensi energi, konservasi air dan penurunan beban pencemar, reduksi emisi, pengurangan dan pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) serta penerapan reduksi, reuse dan recycle (3R) limbah padat non B3 (KLH, 2014). Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PKT belum menggunakan *social mapping*. Program CSR yang dijalankan PKT belum menyentuh pada kebutuhan masyarakat setempat, masih banyak program yang

bentuknya *charity* (berdasarkan pengajuan proposal warga setempat) bukan pemberdayaan masyarakat seperti yang diamanahkan di *Proper beyond compliance*, program CSR dikelola oleh beberapa unit kerja dan tidak saling terintegrasi, sehingga program berhenti setelah seremonial perusahaan dilaksanakan dan tidak berkelanjutan. Dengan demikian masih banyak protes masyarakat kepada perusahaan, baik di area terdampak (ring-1) ataupun area pesisir (ring-2) (Syarief, 2011). Setelah tahun 2015 PKT menerapkan program *beyond compliance Proper* KLHK sepenuhnya, dimana salah satu komponennya adalah *Comdev*, maka program *comdev* dilaksanakan oleh satu unit kerja khusus yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 21/DIR/VI.17 tanggal 16 Juni 2017 yaitu Departemen CSR diberi mandat untuk melaksanakan CSR bentuk pemberdayaan masyarakat (*comdev*), sehingga program *Comdev* PKT yang dilaksanakan menjawab kebutuhan masyarakat karena berdasarkan hasil rekomendasi kajian *social mapping* yang dibuat pada area ring 1 dan ring 2, melibatkan masyarakat setempat dalam menyusun program CSR, melakukan pendampingan, melakukan pemantauan dan evaluasi bersama *stakeholder* terkait. Dari uraian identifikasi permasalahan CSR PKT tersebut dapat disajikan perumusan masalah mayor dan minor, sehingga pertanyaan penelitiannya:

A.pertanyaan penelitian dari perumusan masalah mayor

1. bagaimana bentuk-bentuk CSR khususnya *Comdev* yang dijalankan oleh PKT?

B.pertanyaan penelitian dari perumusan masalah minor

1. apa faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk-bentuk CSR khususnya *comdev* PKT?
2. bagaimana proses CSR yang dilakukan oleh PKT?
3. bagaimana peran berbagai *stakeholder*?
4. bagaimana pengaruh perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan di lokasi CSR?

5. bagaimana model pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan?

Program unggulan *comdev* PKT yang diambil dalam penelitian ini adalah 2 dari 7 program unggulan yaitu: (1)kompos berbasis masyarakat di RT-07 Kelurahan Guntung; (2)budidaya ikan kerapu dan lobster pada keramba jaring apung (KJA) di pesisir Tanjung Limau Kelurahan Bontang Baru. Alasan dipilihnya 2 program *comdev* unggulan PKT tersebut adalah:

- 1.kompos berbasis Masyarakat di RT-07 Kelurahan Guntung yang mewakili program CSR PKT di wilayah darat yang lokasinya berbatasan paling dekat dengan pabrik PKT.
- 2.budidaya ikan kerapu dan lobster pada keramba jaring apung (KJA) di Tanjung Limau Kelurahan Bontang Baru mewakili program CSR PKT di wilayah pesisir yang lokasinya berdekatan dengan jalur masuk kapal ke PKT membawa bahan baku pupuk, dan jalur keluar kapal dari PKT yang membawa produk pupuk serta amoniak PKT untuk dipasarkan.
- 3.dari sisi kelembagaan kedua program CSR tersebut telah berbentuk koperasi, merupakan area terdampak langsung dari kegiatan bisnis PKT, sudah menggunakan *social mapping* (sosmap) dengan acuan Proper dan sudah *exit program*.
- 4.merupakan area terdampak langsung dari kegiatan bisnis PKT
- 5.keduanya merupakan program unggulan CSR PKT

### C. Orisinalitas Penelitian

Banyak perusahaan telah melaksanakan praktek *comdev* dengan mengembangkan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat, menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar, memfokuskan pada lingkungan, praktek adanya nilai bersama yang di-*sharing*-kan, telah banyak dilakukan oleh peneliti di Indonesia maupun peneliti di luar negeri. Beberapa penelitian dengan topik sejenis disajikan dalam Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Penerbit, Sumber dan Tahun	Metode	Tujuan Penelitian	Hasil
1	Peran <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. Badak NGL Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Telihan Kota Bontang; Logho.M.A., Resmawan.E., Alaydrus,A.; <a href="http://ejournal.ipfisisip-unmul.ac.id">ejournal.ipfisisip-unmul.ac.id</a> ; eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 1, 2019.	Kualitatif	Untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan ekonomi, dunia pendidikan dengan pemberian beasiswa, bantuan infrastruktur, peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui jasmani dan rohani (pembuatan sarana dan prasarana OR dan pembangunan masjid).
2	<i>The Impact of Diverse Corporate Social Responsibility Practices on Consumer Product Evaluations</i> ; <sup>1</sup> Xiaoye Chen; <sup>2</sup> Rong Huang; <sup>1</sup> School of Business and Entrepreneurship, North Central College, Naperville, Illionis, USA; <sup>2</sup> Economics and Business Department, Saint Anselm College, Manchester, New Hampshire, USA; <i>Journal of Product &amp; Brand Management</i> Volume 27, Issue 6, 2018	Deskriptif Eksperimen	Makalah ini bertujuan untuk menyelidiki apakah upaya CSR yang berorientasi pada CSV menghasilkan keuntungan persepsi yang berkenaan dengan evaluasi yang berhubungan dengan produk konsumen dibandingkan dengan CSR lainnya. Penelitian ini juga mengungkapkan jalur konsumen yang menghubungkan dampak asosiasi perusahaan terhadap perusahaan dan evaluasi produk dan keinginan membeli	Penelitian ini menunjukkan bagaimana praktek-praktek tanggung jawab sosial yang berbeda-beda dapat memberikan dampak pada evaluasi produk dan bagaimana tampilan <i>Corporate Assesment (CA)</i> dan CSR mampu berpengaruh pada kerelaan dan keinginan konsumen membeli suatu produk. Dilakukan dengan desain eksperimental antar subjek dengan 274 mahasiswa sebuah universitas di Amerika Utara yang belum lulus sebagai partisipan.
3	<i>Disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) and Value Creation: Evidence from China</i> ; Chin-Chen Yeh, et.al.; Department of Management Science National Chiao Tung University, Taiwan; <i>Transnational Corporations Review</i> , Volume 3, Number 3, 2011	Deskriptif kualitatif	Penelitian ini menguji apakah konteks pengungkapan CSR dapat mempengaruhi <i>firm's market value (MV)</i> di Cina.	Keterlibatan dalam kegiatan CSR terutama dalam membangun hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan dan pada akhirnya meningkatkan nilai pasar. Perusahaan perlu mengalokasikan sumber daya untuk CSR sehingga dapat mempengaruhi semua kelompok pemangku kepentingan. Oleh karena itu, CSR dipandang sebagai investasi yang dapat mengarah pada pencapaian tujuan kinerja yang berkesinambungan.
4	<i>Mapping Corporate Social Responsibility (CSR) Strategies in The Construction and Engineering Industry</i> ; Martin Loosemore & Benson Teck Heng Lim; Faculty of the Built environment, university of new south Wales, Sydney, NSW	Deskriptif Kualitatif	Penelitian CSR di industri konstruksi dan teknik bertujuan untuk meneliti tentang apakah dan bagaimana perusahaan dalam industri ini mengoperasionalkan CSR, bagaimana mereka memasukkan CSR ke	Menunjukkan bahwa CSR perusahaan di bidang konstruksi dan teknik sebagian besar bersifat informal. Kurang inovatif, patuh terhadap sistem yang berlaku dan hal ini ada pada tahap awal pengembangan sehingga inisiatif CSR dan

No	Judul, Peneliti, Penerbit, Sumber dan Tahun	Metode	Tujuan Penelitian	Hasil
	2025, Australia; Construction Management and Economics, Volume 36, Issue 2, 2018		dalam visi bisnis, kepemimpinan dan misi serta strategi perusahaan dan bentuk strategi apa yang perusahaan terapkan.	potensi modal sosial yang berasal dari hubungan strategis dengan masyarakat terbuang sia-sia.
5	<i>The Role of Corporate Social Responsibility (CSR) and Internal CSR Communication in Predicting Employee Engagement</i> ; Gaelle Duthler, Ganga S. Dhanesh; College of Communication and Media Sciences, Zayed University, United Arab Emirates; Public Relations Review Volume 44, Issue 4, 2018	Deskriptif Studi kasus	Meneliti hubungan antara persepsi karyawan tentang CSR, ketiga model komunikasi internal CSR dan keterlibatan karyawan	Memperlihatkan adanya hubungan antara tanggung jawab sosial (CSR), komunikasi internal, dan keterlibatan karyawan dalam pelaksanaan CSR. Hal ini dilakukan melalui survei terhadap 516 karyawan berumur 18 tahun ke atas dari berbagai sektor industri di Uni Emirat Arab
6	<i>Assessing Social and Environmental Performance Through Narrative Complexity in CSR Reports</i> ; Jamal A. Nazari, et al; Beedie School of Business, Simon Fraser University, 8888 University Drive, Burnaby, BC V5A 1A6, Canada; Journal of Contemporary Accounting & Economics Volume 13, Issue 2, 2017	Deskriptif Studi kasus	Menganalisa hubungan antara kompleksitas pengungkapan informasi yang bermanfaat tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan performa CSR yang aktual dan mendalilkan sebuah hubungan yang positif antara performa CSR yang aktual dan dokumen-dokumen pengungkapan CSR	Kompleksitas dan keterbacaan dalam laporan CSR dapat bermanfaat untuk mengetahui performa sosial dan lingkungan suatu perusahaan, serta kredibilitas dari pengungkapan CSR itu sendiri melalui sampel laporan-laporan CSR lintas bagian yang berdiri sendiri dan diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan besar di Amerika
7	<i>Corporate Social Responsibility (CSR) Reporting in The Mining Sector of Tanzania (Lack of) Government Regulatory Controls and NGO Activism</i> ;Sarah George Lauwo,et al.,;Essex Business School, University of Essex, Colchester, UK; Accounting, Auditing & Accountability Journal, Volume 29, No. 6, 2016	Deskriptif Kualitatif	Untuk berkontribusi terhadap perdebatan tentang tata Akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di sektor pertambangan dalam konteks negara berkembang. Mengkaji praktik pelaporan dari dua negara transnasional terbesar dengan perusahaan tambang emas di Tanzania; menarik perhatian pada peran pemerintah daerah dan advokasi serta kampanye oleh organisasi non-pemerintah yang terorganisasi secara nasional (LSM) sehubungan dengan mempromosikan pelaporan praktik sosial perusahaan.	Memberikan beberapa wawasan dari pertambangan emas Tanzania yang menunjukkan bahwa laporan CSR merupakan hasil dari peran Perusahaan, negara itu sendiri (Pemerintah) dan LSM.

No	Judul, Peneliti, Penerbit, Sumber dan Tahun	Metode	Tujuan Penelitian	Hasil
8	<i>Co-creating Value in the Dyadic Relationships of Small and Large Firms in The Agri-Food Sector</i> , Isaac K. Ngugi; The Business School, Bournemouth University, Talbot Campus, Dorset House, Fern Barrow, Poole Dorset BH12 5BB, UK. Journal Of International Food & Agribusiness Marketing Volume 31, Issue 1, 2019	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini mengembangkan literatur yang masih ada tentang nilai <i>co-creation</i> dalam hubungan bisnis dengan memeriksa kompleksitas fenomena pada konteks perusahaan kecil dan besar di sektor pangan organik.	Proses interaksi dalam hubungan bisnis bukan hanya melibatkan pertukaran tetapi juga melibatkan nilai <i>co-creation</i> . Penciptaan nilai yang terjadi pada area kerja sama dan pihak yang berkolaborasi mampu memunculkan atau melakukan sesuatu yang biasanya tidak dilakukan sendirian. Disarankan bahwa small and medium sized (SME) supplier dan para pelanggan mereka yang lebih besar berkolaborasi dalam banyak area termasuk inovasi, CSR, perencanaan dan pembelajaran interaktif.
9	<i>The Influence of The Implementation of CSR On Business Strategy: An Empirical Approach Based on Cameroonian Enterprises</i> ; Boubakary, Doumagay Donatienne Moskolai; The University of Yaounde II, Yaounde, Cameroon; Arab Economic and Business Journal, Volume 11, Issue 2, 2016	Deskriptif Kualitatif	Fokus pada sebuah studi yang dilakukan pada perusahaan di Kameron dalam menganalisis pengaruh pelaksanaan CSR dalam strategi bisnis.	Penerapan pendekatan CSR mempengaruhi, secara positif dan signifikan, inovasi, reputasi dan diferensiasi perusahaan.
10	<i>The Significance of CSR in A/R CDM Promotion from The Case Study of Japan: a Focus on Corporate Forest Related Activities and Emission Trading</i> ; Takashi Fukushima; Graduate School of Agricultural and Life Sciences; The University of Tokyo, Tokyo, Japan; Journal of Forest Research, Volume 18, Issue 4, 2013	Deskriptif Studi kasus	Menganalisa dan mendiskusikan aktivitas terkait hutan perusahaan, perdagangan emisi dan hubungan antara A/R CDM (afforestasi/reforestation clean development mechanism (mekanisme pembangunan yang bersih) dan CSR berdasarkan hasil yang Diperoleh dari kuesioner. CSR tidak cukup sebagai kekuatan pendorong untuk mempromosikan A/R CDM, tetapi mampu untuk mempromosikan kegiatan terkait hutan yang berorientasi pada keseimbangan karbon dioksida.	Signifikansi CSR dalam mempromosikan A/R CDM, tetapi juga menyelidiki keadaan aktual terkait dengan perusahaan hutan Negara dan aktivitas emisi perdagangan dan analisa dari perspektif CSR. Metode survei utama terdiri dari kuesioner perusahaan dan studi literatur.

No	Judul, Peneliti, Penerbit, Sumber dan Tahun	Metode	Tujuan Penelitian	Hasil
11	Analisis Daya Dukung Lingkungan Perairan Marikultur Batam Estet (BME) Batam, Sachoemar, S.I, Jurnal Hidrosfir Indonesia, Volume 1, Nomor 2, 2006, published 2019.	Deskripsi	Untuk menganalisa material balance input dan output nitrogen dalam “black box” system	Perairan Nguan Batam merupakan perairan oigotrofik-mesotrofik yang kandungan haranya masih rendah / belum tercemar. Analisis daya dukung lingkungan Perairan Marikultur Batam Estet (BME) baik / belum tercemar sehingga sangat baik dan potensial untuk pengembangan budidaya ikan kerapu secara intensif berskala industri tetapi tetap berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan perairan BME.
12	Analisis Kesesuaian Budidaya KJA Ikan Kerapu menggunakan Sig di perairan Ringgung Lampung, Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan, Volume 9, Nomor 1, Hastari,I.F.,et al, 2017.	Deskripsi	Untuk membantu menentukan kesesuaian perairan Ringgung Lampung untuk budidaya ikan kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA).	Hasilnya dari total area seluas 99.168,5 ha yang digunakan untuk budidaya ikan kerapu di KJA hasilnya 85.94 % sangat sesuai, 5.64% sesuai dan 8.42 % tidak sesuai
13	Daya Dukung Lingkungan Perairan Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau Untuk Kegiatan Budidaya Ikan Dalam Keramba Jaring Apung, Ulfah,M.et al, Jurnal Kajian Lingkungan, Vol 2,2014 2019	Deskripsi	Untuk menentukan daya dukung lingkungan berdasarkan parameter phisik, kimia dan biologi sebagai bio indikator dan mengestimasi dampak ekonomi dan ekologi dalam pengembangan aquakultur di area pesisir.	Hasilnya perairan di Mantang kondisinya baik sesuai dengan Permen LH Nomor 51 tahun 2004 dimana PH dan DO di bawah standart namun untuk parameter phosphate menunjukkan “alarm condition” (perlu hati-hati). Hasil perhitungan untuk daya dukung di Mantang masih dapat mengakomodir 650 buah KJA.
14	Pengembangan Perikanan Budi Daya Kerapu Bebek ( <i>Chromilepses altivelis</i> ) di Pulau Gebe, Halmahera Tengah, Maluku Utara, Insani.M.T.S, et al, Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat, Volume 3 (1), 2016	Pelatihan dan pendampingan.	Untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam pemeliharaan ikan kerapu bebek ( <i>Chromilepses altivelis</i> ) di KJA di Desa Umera dan Umiyal sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di Pulau Gebe.	Hasilnya masyarakat pembudidaya ikan mampu memelihara bibit ikan kerapu bebek (hasil pemijahan buatan), mampu memanen dan menjual hasil penampungan bibit hasil tangkapan dari alam yang telah dipelihara selama 2-4 bulan dalam KJA.
15	<b><i>Analysis of Empowerment Fisherman Community in Tobelo, North Halmahera</i></b> Michel Sipahelut, Budy Wiryawan, Tri Wiji Nurani, Sekolah Pascasarjana IPB Bogor,2010.	Survey dengan subyek penelitian 40 sampel.	Untuk: 1) mengkaji implikasi program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) terhadap kinerja pengembangan teknologi, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat pesisir, 2) menentukan strategi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program PEMP telah memicu perubahan perkembangan sosial budaya, teknologi, ekonomi dan kelembagaan

No	Judul, Peneliti, Penerbit, Sumber dan Tahun	Metode	Tujuan Penelitian	Hasil
			peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir di lokasi penelitian, 3) memberikan strategi perbaikan bagi masyarakat pesisir di lokasi penelitian.	masyarakat pesisir di Kabupaten Halmahera Utara.
16	Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Klinik Iptek Mina Bisnis (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)., Robert Durianto, Agus Suryono, Hermawan., Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 1, Hal. 22-28,2014.	Deskriptif Kualitatif	Untuk mendeskripsikan kelembagaan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) sebagai wadah pemberdayaan masyarakat nelayan melalui komunikasi, advokasi/pendampingan, dan konsultasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan, kegiatan KIMBis sejauh ini belum maksimal masih terdominasi pelatihan untuk masyarakat dan keterlibatan <i>stakeholders</i> dipahami tidak terjadi secara optimal. Beberapa capaian dari kegiatan ini, yaitu (a) Meningkatnya orientasi kewirausahaan dan (b) Kualitas sumberdaya manusia berkembang cukup baik.
17	<i>Composting Process: a Review</i> , Rasa,S. and Ahmad,J., International Journal Of Biological Research,4(2) 2016	Studi literatur	Untuk membuktikan bahwa pengomposan adalah metode recycle limbah organik yang penting dan ekonomis.	Hasil studi literatur menunjukkan bahwa kompos adalah pembenah tanah yang paling baik, karena dapat memperbaiki struktur tanah dan menyediakan nutrisi yang baik bagi tumbuh-tumbuhan.
18	Kompos Daun Solusi Kreatif Pengendali Limbah, Setyaningsih.E.,et.al, Bioeksperimen, Volume 3 Nomor 2, 2017	Studi Kasus	Untuk membuat kompos daun sebagai solusi kreatif pengendali limbah di Kampus I, II dan IV Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Kompos yang baik berwarna coklat kehitaman, aroma tidak menyengat/bau tanah dan tekstur menggumpal dan selama proses fermentasi harus memperhatikan beberapa faktor diantaranya yaitu suhu, PH dan kelembaban.
19	<i>From Corporate Social Responsibility (CSR) to Creating Shared Value (CSV) With Suppliers Through Mutual Firm Foundation in The Korean Bakery Industry: A Case Study of The SPC Group</i> ; Dongmin Lee, et. al.; Asia Pacific Business Review, Vol. 20, No. 3, 2014	Deskriptif studi kasus	Untuk menyediakan teori dan latar belakang empiris pada proses transformasi strategi non-pasar perusahaan dari CSR ke CSV. Sehingga dalam menginvestigasi transformasi, penelitian pada pembagian nilai yang telah dibuat melalui <i>Supplier Relationship Management</i> (SRM) telah dilakukan. Secara khusus, penelitian ini menunjukkan dampak dan hasil dari strategi non-pasar transisi di SRM seperti hubungan	Mengusulkan perubahan dari strategi non pasar bertransformasi dari CSR ke CSV. Khususnya, aktivitas SRM dari kelompok SPC digunakan sebagai unit dalam analisis berbasis pada teori aktivitas dan teori triple-Helix. Kelompok SPC, subjek SRM ini mengelola hubungan pemasok dengan mendorong pemasok untuk bertanggung jawab (objek) dalam norma sosial dan dalam aturan yang diberlakukan pada kegiatan ini.

No	Judul, Peneliti, Penerbit, Sumber dan Tahun	Metode	Tujuan Penelitian	Hasil
			temporal, kontrak jangka panjang, dan kesamaan dasar perusahaan.	Hubungan antara subjek dan objek dimediasi oleh alat, komunitas, dan pembagian kerja.
20	<i>Shifting Corporate Social Responsibility to Corporate Social Opportunity Through Creating Shared Value</i> ; HwY-Chang Moon, Jimmyn Parc; Seoul Business School, Seoul School of Integrated Science and Technology, Seoul, South Korea; Briefings in Entrepreneurial Finance, Volume 28, Issue 2, 2019	Deskriptif Kritikal review (tinjauan kritis)	Untuk meneliti penelitian yang paling relevan dalam rangka menganalisa dan membandingkan berbagai konsep CSR. Berdasarkan analisis artikel ini menunjukkan masalah penting berbagai konsep dan mempertajam definisi dari CSR dan CSV. Selain itu, artikel ini mengusulkan tipologi baru untuk kegiatan sosial perusahaan. Tipologi ini memiliki perbedaan yang jelas antara berbagai kegiatan sosial. Dengan cara ini, dapat berfungsi sebagai manfaat perusahaan untuk meningkatkan daya saing sekaligus mendukung manfaat sosial secara bersamaan.	Analisis komparatif dalam meningkatkan tingkat pemahaman tentang CSR dan CSV dan mengusulkan tipologi baru untuk kegiatan sosial perusahaan yang bermanfaat dalam meningkatkan daya saing sekaligus mendukung manfaat sosial secara bersamaan.
21	<i>Enhancing Shared Value and Sustainability Practices of Global Firms: The Case of Samsung Electronics</i> , Yeon W. Lee; Seoul Business School, Seoul School of Integrated Science and Technology, Seoul, South Korea; Briefings in Entrepreneurial Finance, Volume 28, Issue 2, 2019	Deskriptif Studi Kasus	Mengungkapkan bahwa Samsung telah menunjukkan upaya dedikasi pada CSV akan tetapi pada tingkat yang tidak konsisten dan pasif dalam meningkatkan nilai bisnis. Sebagian besar tindakannya sangat terfokus pada kebijakan yang baik dan meningkatkan nilai sosial, serta perlu perbaikan lebih lanjut dalam meningkatkan daya saing dengan menghubungkan masalah sosial dan kelemahan perusahaan dalam rantai nilai kegiatan yang fokus pada kompetensi utamanya.	Adanya pergeseran secara bertahap pada perusahaan global dalam mencoba menghubungkan kinerja bisnis pada kontribusi sosial (CSV)
22	<i>Corporate Social Responsibility (CSR), Country Reputation and Corporate Reputation. A Perspective on The Creation of Shared Value in</i>	Deskriptif Makalah konseptual	Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan performa keuangan	Menjelaskan bagaimana dasar hubungan antara CSR dan CFP dapat diperluas serta berhubungan dengan penciptaan nilai ekonomi

No	Judul, Peneliti, Penerbit, Sumber dan Tahun	Metode	Tujuan Penelitian	Hasil
	<i>Emerging Markets</i> ; Keith James Kelley and Thomas A.; Hemphill (Schools of Management, University of Michigan-Flint, Flint, Michigan, USA) Yannick Thams (Department of Strategy and International Business, Suffolk University Sawyer Business School, Boston, Massachusetts, USA); <i>Multinational Business Review</i> Volume 27, Issue 2, 2019		perusahaan (Corporate Finance Performance/CFP) dari perspektif shared value. Menjelaskan bagaimana inisiatif CSR mampu menambah reputasi baik perusahaan dan negara dengan menggunakan reputasi sebagai sebuah bentuk nilai yang bertingkat yang menjadi mediasi hubungan CSR-CFP dan bagaimana jumlah shared value antara dua peranan penting untuk CFP	dan sosial pada saat yang sama sebuah perusahaan dengan reputasi perusahaan sebagai penghubung pada kegiatan ekonomi yang tumbuh di Amerika Latin ditinjau dari kepustakaan.
23	<i>Corporate Social Responsibility (CSR) as Shared Value Creation (CSV): Towards a Communicative Approach</i> ; Christiane Marie Høvring; Aarhus University, Aarhus, Denmark; <i>Corporate Communications: An International Journal</i> , Volume. 22 Issue 2, 2017	Deskriptif Makalah konseptual	Makalah ini bertujuan untuk menciptakan konsep ulang tentang penciptaan nilai yang sama (CSV) dengan sebuah pendekatan komunikatif sebagai alternatif untuk situasi saat ini yang ada di antara perspektif manajemen dan sosial	Model komunikasi pokok CSR yang aktual menjadi penyokong CSV sehingga konsep ulang tentang CSV menjadi pendekatan alternatif yang mampu memahami proses interaksi yang baik antara perusahaan dan pemegang saham terkait dengan penciptaan nilai sosial dan ekonomi pada saat yang sama
24	<i>Creating Value Through CSR Across Company Functions and NGO Collaborations a Scandinavian Cross-Industry Case Study</i> ; Lise Lodsgård, Annabeth Aagaard; Department of Business Development and Technology, Aarhus University, Birk Centerpark 15, 7400 Herning, Denmark; <i>Scandinavian Journal of Management</i> Vol 33(3), 2017	Deskriptif Studi kasus	Mengeksplorasi bagaimana nilai dan penciptaan nilai didefinisikan dalam konteks kerjasama antara CSR dan LSM dan terintegrasi di seluruh area fungsional utama perusahaan	Penerapan dan pendekatan lima perusahaan terhadap kolaborasi CSR dan LSM untuk memfasilitasi penciptaan nilai bisnis dan pengembangan inovasi yang berkelanjutan.
25	<i>The Role of Leadership in Shared Value Creation (CSV) from The Public's Perspective: A Multi-Continental Study</i> ; Yi-Ru Regina Chen, et. al.; <i>Public Relations Review</i> Vol 46(1), 2020	Deskriptif Studi banding	Menyelidiki apakah bagian Humas lebih memilih perusahaan untuk mempraktekkan CSV sebagai lawan dari hakikat CSV sebagai sebuah tujuan yang terpisah dari kepentingan bisnis. Mengeksplorasi peran kepemimpinan sebagai sebuah konsep yang berpengaruh dan etis dalam	Keterlibatan Humas dan masyarakat dalam pengembangan CSV dilakukan melalui survei yang diikuti oleh 1784 partisipan yang berumur 18 tahun ke atas secara acak dengan jumlah partisipan Amerika = 593, Jerman = 592, dan China = 599, survei dilakukan secara online.

No	Judul, Peneliti, Penerbit, Sumber dan Tahun	Metode	Tujuan Penelitian	Hasil
			mengimplementasikan CSV yang efektif seperti yang dimengerti oleh masyarakat	
26	<i>Creating Shared Value (CSV) Through Partnership in Agricultural Production in Sri Lanka</i> , Priyan Senevirathna; Politics and International Relations, School of Social Sciences, Leeds Beckett University, Leeds LS1 3HE, United Kingdom; Geoforum Volume 90, March 2018	Deskriptif Kritikal review (tinjauan kritis)	Meneliti politik ekonomi dari kemitraan strategis antara lembaga-lembaga pembangunan dengan pihak swasta sebagai sebuah proses penciptaan nilai yang sama (CSV) di bidang produksi agrikultur	Secara kritis menilik kembali proses penciptaan nilai ekonomi dan sosial pada saat yang sama (CSV) yang terjadi di kemitraan strategis pada bidang agrikultur oleh perusahaan dengan lembaga pembangunan melalui pertanian sistem kontrak yang diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, dilakukan dengan Studi kepustakaan
27	<i>Measuring Shared Value in Multinational Corporations</i> ; Thomas Laudal; Department of Social Sciences, Business School, University of Stavanger, Stavanger, Norway Social Responsibility Journal, Volume 14, Issue 4, 2018	Deskriptif Makalah konseptual	Tujuan dari makalah ini adalah menyarankan sebuah cara penggambaran CSV untuk mengesahkan klaim dan berkontribusi terhadap fondasi industri dengan peringkat tertentu berdasarkan CSV	Menggambarkan CSV dengan indikator-indikator CSV berdasarkan interpretasi Porter and Kramer (2011) yang merujuk pada pendekatan yang berpusat pada pasar untuk tanggung jawab sosial perusahaan yang apabila digabungkan mencirikan perusahaan multi-nasional yang berjaya.

Berdasarkan penelusuran pada hasil-hasil penelitian yang disajikan dalam Tabel 4, sudah ada penelitian yang menganalisa penerapan *comdev* budidaya ikan kerapu dan lobster dalam Keramba Jaring Apung (KJA) dan kompos berbasis masyarakat Meksarsari, orisinalitas / novelty penelitian ini yaitu:

1. mengkritisi teori tipologi *comdev* dari Matarrita-Cascante-Brennan (2012) sebagai tesis (gagasan asli) meliputi *imposed* (didesakkan) merupakan tipologi level terendah, *directed* (diarahkan) merupakan tipologi level menengah dan *self help* (swadaya) merupakan tipologi level tertinggi. Tipologi *comdev* gagasan dari Matarrita-Cascante-Brennan (2012) tidak akan berjalan dengan baik bila dilaksanakan secara terpisah atau sendiri-sendiri, namun bila dilaksanakan secara bersamaan dengan adanya partisipasi masyarakat sejak perencanaan program maka tipologi *imposed* akan naik level ke tipologi *directed* (tesis), demikian juga untuk tipologi *self help* dengan adanya recognisi dari perusahaan PKT akan turun levelnya ke tipologi *directed* sehingga berlawanan dengan gagasan Matarrita-Cascante-Brennan (2012) yang disebut antitesis, turun level bukan berarti tidak baik hasilnya, justru sebaliknya hasilnya menjadi lebih baik. Dengan tipologi *imposed* dibawa ke tipologi *directed* dan *self help* dibawa ke tipologi *directed* maka saling melengkapi (sinthesa tesis dan antitesis). Target program CSR dapat dicapai dengan lebih cepat, memandirikan masyarakat binaan dan melahirkan inovasi sosial.
2. terciptanya model CSR Plus (CSR<sup>+</sup>) yaitu pelaksanaan program CSR yang lebih dari sekedar program CSR, karena adanya hasil bagi dari laba bersih yang didapat dari penjualan ikan kerapu oleh Koperasi Bontang Ekonomi dan Pariwisata Maritim, manakala perusahaan PKT menyediakan bibit ikan kerapu dari Situbondo Jawa Timur atau dari Gondol Bali. Besarnya hasil bagi dari laba bersih adalah 50% untuk PKT dan 50% untuk Koperasi Bontang Ekonomi dan Pariwisata Maritim sebagai binaan PKT. Kemudian

bagian PKT disetor langsung oleh koperasi nelayan ke Departemen CSR yang mana selanjutnya laba tersebut digunakan untuk pembelian bibit berikutnya. Dalam hal ini kematian bibit ikan kerapu selama pengiriman, pemeliharaan sampai panen dan penjualan ditanggung oleh PKT, jadi yang dibuat sebagai patokan hasil bagi adalah jumlah bibit ikan kerapu yang bertahan hidup selama pengiriman, pemeliharaan sampai panen hingga penjualan. Bila bibit ikan kerapu diusahakan sendiri oleh nelayan dari bibit alam yang berasal dari perairan Bontang, maka tidak ada hasil bagi ke perusahaan PKT, semua laba masuk ke koperasi nelayan. Laba bersih adalah total penjualan dikurangi biaya bibit, dikurangi biaya transportasi dan biaya operasional dibagi 2 dikalikan 100%, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Laba bersih} = \frac{\text{Hasil penjualan} - (\text{biaya bibit} + \text{pakan} + \text{transport}) - \text{biaya operasional}}{2} \times 100\%$$

2

#### D. Alasan Penelitian

Alasan penelitian CSR budidaya ikan kerapu dan lobster di Tanjung Limau Kelurahan Bontang Baru serta Kompos berbasis masyarakat Mekarsari di RT-07 Guntung dilakukan agar model CSR pemberdayaan masyarakat nelayan di Tanjung Limau dan pemberdayaan masyarakat di RT-07 Kelurahan Guntung dapat dijadikan model pemberdayaan masyarakat di tempat lainnya (replikasi). Dengan demikian manfaat program pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas.

## E. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian dilakukan agar masyarakat mengetahui dan merasakan bahwa kehadiran perusahaan di tengah masyarakat itu membawa manfaat bagi masyarakat di sekitarnya, dimana perusahaan dapat turut andil dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat sekitar perusahaan dengan melaksanakan program CSR bentuk pemberdayaan masyarakat, bentuk CSR lainnya seperti *charity*, *infrastruktur* dan *capacity building* bukan berarti diabaikan namun tetap dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya program bentuk pemberdayaan masyarakat hingga masyarakat mandiri, berkelanjutan dan tidak tergantung pada perusahaan. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang mandiri yang pada akhirnya menjadi mitra perusahaan. Di sisi perusahaan akan mendapatkan lisensi sosial dari masyarakat untuk keberlanjutan operasional perusahaan, sehingga tercipta hubungan yang baik (harmonis) antara perusahaan dan masyarakat. Dalam melaksanakan program CSR bentuk pemberdayaan perusahaan memerlukan kerjasama dengan *stakeholder tri sector partnership* (Pemerintah, Masyarakat Sipil, dan Perusahaan itu sendiri ataupun kolaborasi dengan perusahaan lainnya) sehingga pelaksanaan program CSR dapat berjalan efektif dan mencapai target yang direncanakan.

## F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi / menganalisis bentuk-bentuk CSR PKT, menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi bentuk-bentuk CSR khususnya *comdev*, peran *stakeholder* dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat PKT pada 2 CSR unggulan, yaitu program pembuatan kompos berbasis masyarakat di RT-07 Kelurahan Guntung dan budidaya ikan kerapu serta lobster di KJA dengan lokasi di pesisir Tanjung Limau Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dalam pembangunan berkelanjutan adalah:

1. menganalisis bentuk-bentuk CSR PKT
2. menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi bentuk-bentuk CSR khususnya *comdev* PKT
3. menganalisis proses *comdev* mulai tahap perencanaan hingga implementasi pada program CSR PKT
4. menganalisis peran *stakeholder*
5. mengevaluasi dampak perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan CSR PKT terhadap masyarakat sekitar
6. mengajukan model pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat mandiri dan berkelanjutan

#### G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan penerapan teori *comdev* pada program pembuatan kompos berbasis masyarakat, serta budidaya ikan kerapu dan lobster di KJA, sehingga manfaat secara teoretis dan praksis adalah sebagai berikut:

1. manfaat secara **teoretis** adalah: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori program kompos berbasis masyarakat dan budidaya ikan kerapu dan lobster di KJA yang berdasarkan *triple bottom P* (ekonomi, sosial dan lingkungan) dalam bingkai pembangunan berkelanjutan.
2. manfaat **praksis**: hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam program kompos berbasis masyarakat dan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam program budidaya ikan kerapu dan lobster serta pemberdayaan dasawisma, sehingga masyarakat berdaya dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan.

- a. Untuk masyarakat RT-07 Guntung dan masyarakat Pesisir Tanjung Limau: masyarakat menjadi mandiri.
- b. Dapat dijadikan referensi:
  - pemberdayaan masyarakat pesisir melalui budidaya kerapu dan lobster di KJA.
  - masyarakat di RT-07 Guntung ataupun lainnya dalam mewujudkan kampung hijau.
- c. Bagi PKT akan mendapatkan citra sosial yang baik di mata masyarakat sehingga dapat mendukung keberlangsungan operasional pabrik dengan lancar.